KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2019 telah selesai dilaksanakan sebagai wujud sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pencapaian *"good governance"*.

Penyampaian Laporan Kinerja Tahun 2019 pada dasarnya mengetengahkan gambaran kinerja Bappeda secara utuh selama perjalanan Tahun 2019, berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

Akhir kata, melalui penyampaian Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 akan semakin memberikan informasi pada pelaksanaan kinerja khususnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi perencanaan program dan kegiatan tahun yang akan datang.

Padang, Januari 2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

dto.

Hansastri,SE,Ak,MM,CFrA
Pembina Utama Madya
NIP. 19641013 199103 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk format pertanggung-jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan pelaksanaan rencana kerja. Secara umum Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk (1) mendorong instansi pemerintah melaksanakan Good Governance, karena Laporan Kinerja merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggung-jawabkan: (2) memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dengan instansi pemerintah dan; (3) meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Perangkat Daerah yang mengemban tugas dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Bappeda selama kurun waktu lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Meningkatnya kinerja organisasi

dengan sasaran sebagai bagian integral dalam proses perencanaan strategis Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021 adalah : (1) meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan dan (2) Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.

Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja tahun 2019.

D A F T A R I S I

Halaman

KATA PENGANTAR i

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

1. Gambaran Organisasi 1

1.1.1. Dasar Pembentukan Organisasi 1

1.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi 2

1.1.3. Struktur Organisasi 6

1.1.4. Sumber Daya Manusia 8

2. Aspek Strategis 8

3. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang Sedang Dihadapi Organisasi 9

4. Sistematika Penyajian 10

BAB II : PERENCANAAN KINERJA 12

2.1. Perencanaan Strategis 2016-2021 12

2.1.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 12

2.1.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 13

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda 14

2.1.4. Strategi dan Kebijakan Bappeda 15

2.1.5 Rencana Kinerja Tahun 2019 20

2.2. Perjanjian Kinerja 21

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 24

3.1. Metodologi Pengukuran Pencapaian Target Kinerja 24

3.1.1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 25

3.2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 26

1. Sasaran Strategis 1 27

2. Sasaran Strategis 2 98

3.3. Realisasi Anggaran 104

BAB IV : PENUTUP 109

4.1. Kesimpulan 109

4.2 Saran 109

LAMPIRAN

D A F T A R T A B E L

		Halaman
Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	8
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	14
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	17
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2019	20
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2019	21
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis Tahun 2019	22
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Kinerja	24
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	25
Tabel 3.3	Pencapaian Sasaran Strategis terhadap Indikator Kinerja	26
Tabel 3.4	Kesesuaian Sasaran dan Indikator RPJMD dengan Renstra	27
Tabel 3.5	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019	45
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019	46
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra	46
Tabel 3.8	Kesesuaian sasaran dan indikator Renstra dengan Renja	46
Tabel 3.9	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019	65
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019	65
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra	65
Tabel 3.12	Kesesuaian sasaran dan indikator RPJMD dengan RKPD	80
Tabel 3.13	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019	80
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019	80
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra	80
Tabel 3.16	Kesesuaian sasaran dan indikator RKPD dengan KUA PPAS	81
Tabel 3.17	Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019	96

Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019	96
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra	96
Tabel 3.20	Pencapaian Sasaran Strategis 2	99
Tabel 3.21	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan Berdasarkan Anggaran Kas Tahun 2019	100
Tabel 3.22	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019	101
Tabel 3.23	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja yang terdapat dalam Renstra	101
Tabel 3.24	Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2019	105
Tabel 3.25	Anggaran dan Realisasi Belanja per Program dan Kegiatan Tahun 2019	105

PENDAHULUAN

Dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Atas dasar tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerj selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP merupakan salah satu bentuk implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

1. GAMBARAN ORGANISASI

1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 tahun 2014, di Dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah dimana Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

a. Kepala Badan
b. Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Program; dan
    3. Sub bagian Keuangan .
c. Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan, membawahi :
    1. Sub Bidang Perencanaan Makro;
    2. Sub Bidang Pendanaan Pembangunan; dan
    3. Sub Bidang Sistem Inovasi Perencanaan.
d. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
    2. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
    3. Sub Bidang Sumber Daya Manusia.
e. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan, membawahi :
    1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
    2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
    3. Sub Bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.
f. Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, membawahi :
    1. Sub Bidang Ekonomi;
    2. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur wilayah; dan
    3. Sub Bidang Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
g. Kelompok Jabatan Fungsional

1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat dimana tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan dengan fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunaan daerah;
c. pembinaan dan fasilitasi bidang perencanaan pembangunan daerah lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. penyediaan database perencanaan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan kesekretariatan Badan;
f. pelaksanaan tugas di bidang sumber daya manusia, pemerintahan dan sosial budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah, perencanaan makro dan pendanaan pembangunan serta pengendalian, evaluasi dan data informasi perencanaan pembangunan daerah;
g. penyelenggaraan fasilitasi sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang serta kelompok jabatan Fungsional, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

(1) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan, dengan fungsi sebagai berikut:

a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Badan;
b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

(2) Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan

Bidang Perencanaan Makro dan Pendanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan makro,

pendanaan pembangunan dan sistem inovasi perencanaan dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan makro;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendanaan pembangunan; dan
c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan berbasis teknologi informasi.

(3) Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan

Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kearsipan, Perpustakaan, Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia, Trantibbum Linmas, Pengawasan, Kesekretariatan DPRD, Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Penelitian dan pengembangan, Komunikasi, Persandian, statistik, Fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia;
b. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan dan aparatur; dan
c. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sosial dan budaya.

(4) Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah

Bidang Ekonomi dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, kebencanaan, Pangan, lingkungan hidup, perhubungan, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, urusan kehutanan, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan, urusan perindustrian serta fungsi penunjang urusan pemerintahan keuangan daerah, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
b. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur wilayah; dan
c. penyiapan bahan dan koordinasi perencanaan pembangunan di bidang sumber daya air, tata ruang dan lingkungan hidup;

(5) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Data Informasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Pengendalian Evaluasi dan Data Informasi Perencanaan Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan yang bersumber dari APBN dan APBD, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota serta data informasi perencanaan pembangunan, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan APBD dan APBN;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota; dan
c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Data Informasi Perencanaan Pembangunan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu Jabatan Fungsional Perencana yang bertugas menyiapkan, melakukan dan menyelesaikan kegiatan perencanaan, dengan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan secara menyeluruh meliputi identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijakan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaan.
b. Pengembangan profesi perencanaan meliputi pembuatan karya ilmiah di bidang perencanaan, penerjemahan/penyaduran buku di bidang perencanaan, berpartisipasi secara aktif dalam penerbitan buku di bidang perencanaan,

berpartisipasi secara aktif dalam pemaparan draft/pedoman modul di bidang perencanaan, studi banding di bidang perencanaan dan pengembangan di bidang perencanaan.

c. Melakukan aktivitas penunjang perencanaan dalam bentuk mengajar, melatih, melakukan bimbingan di bidang perencanaan, mengikuti seminar/lokakarya di bidang perencanaan dan menjadi Anggota Tim Penilai Jabatan Perencana.

1.1.3 Struktur Organisasi

Komposisi jabatan struktural, yaitu:

- Jabatan Kepala Badan, Eselon II a
- 1 Jabatan Sekretaris dan 4 Jabatan Kepala Bidang, Eselon III a
- 2 Jabatan Fungsional Perencana
- 15 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV a

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

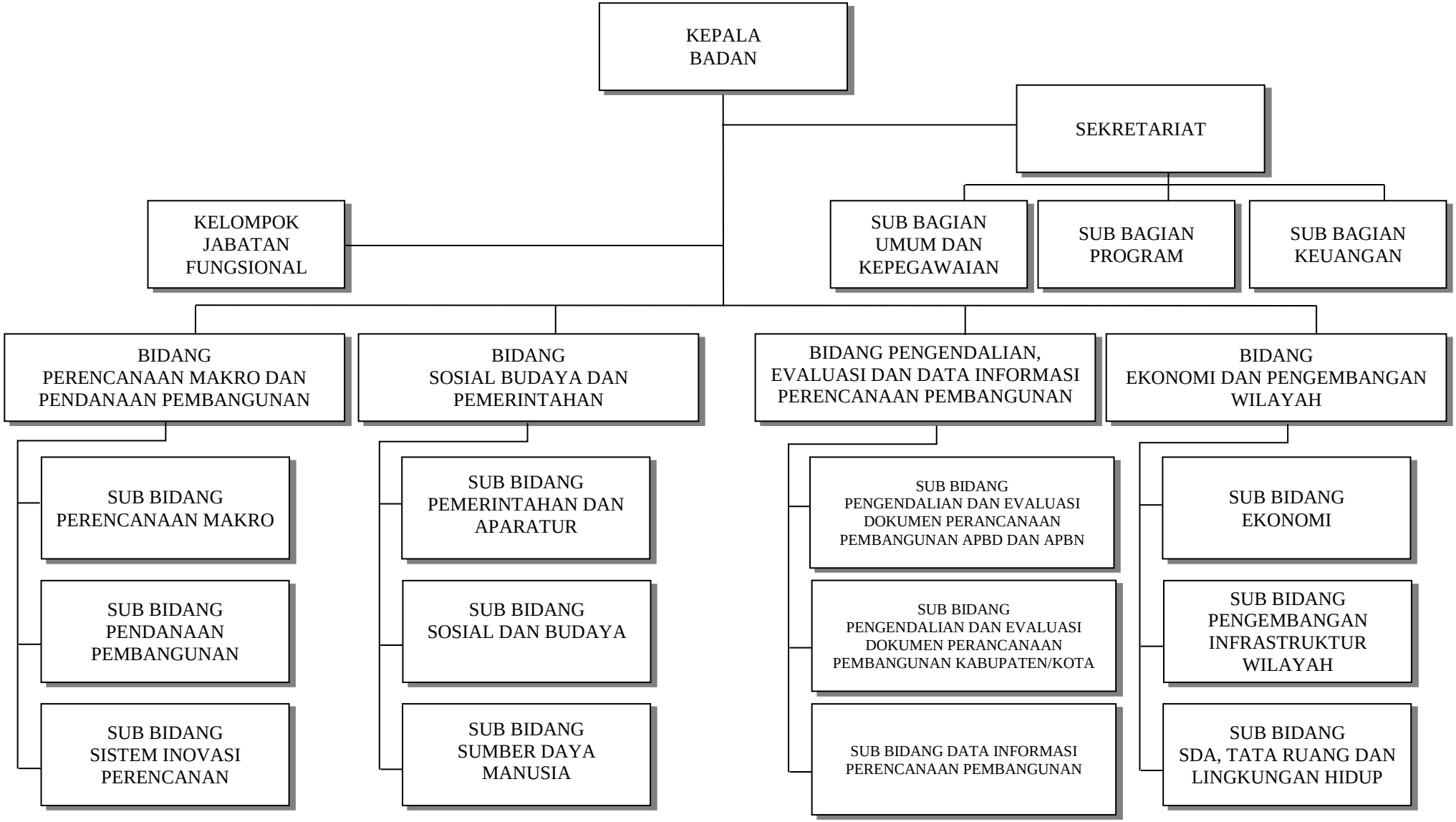

Bagan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1.1.4 Sumber Daya Manusia

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	0	0	0
2.	Strata 2	7	15	22
3.	Strata 1	17	14	31
4.	Sarjana Muda	1	1	2
5.	SLTA	20	9	29
6.	SLTP	4	-	4
7.	SD	1	-	1
	Jumlah	**50**	**39**	**89**

Dari Tabel 1.1. di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Bappeda Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 89 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 2 adalah sebanyak 22 orang, Strata 1 sebanyak 31 orang, Sarjana Muda sebanyak orang, SLTA sebanyak 29 orang, SLTP sebanyak 4 orang dan tamatan SD sebanyak 1 orang.

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappeda Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I = 1 Orang
- Golongan II = 27 Orang
- Golongan III = 50 Orang
- Golongan IV = 11 Orang

2. ASPEK STRATEGIS

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa BAPPEDA sebagai Perangkat Daerah (PD) utama di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan proses perencanaan pembangunan, dalam rangka menjamin

terciptanya pembangunan yang efektif, efisien untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Bappeda sebagai badan yang mengkaji berbagai program dan kegiatan strategi dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, untuk kemudian dirumuskan dalam suatu kebijakan pembangunan, telah menempatkan Bappeda sebagai Perangkat Daerah (PD) yang strategis dalam lingkungan pemerintahan. Selanjutnya komitmen Bappeda Provinsi Sumataera Barat untuk menghadirkan kinerja institusi yang inklusif, transparan dan akuntabel, diharapkan dapat menularkan karakteristik serupa dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat, seiring dengan peran sentralnya dalam proses perencanaan pembangunan.

3. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai badan pelaksana urusan perencanaan perlu melakukan akselerasi dan meyusun strategi terkait dengan kinerja aparaturnya, kedisiplinan serta ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga dapat menjawab tuntutan visi dan misi pembangunan daerah secara nyata dan profesional. Sebagaimana diberlakukannya peraturan perundangan-undangan yang baru terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan mengakibatkan Pemerintah Daerah dan Bappeda khususnya sebagai penyelenggara urusan penunjang perencanaan harus menyesuaikan nomenklatur program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang baru untuk perencanaan berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya terdapat beberapa isu yang sering ditemukan dalam proses perencanaan pembangunan antara lain:

1. Kebutuhan data dan informasi yang aktual, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan ketersediaan data dan informasi yang akurat akan sangat menentukan langkah selanjutnya dalam penentuan keberhasilan perencanaan.
2. Ketersediaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas Sumberdaya Manusia (SDM) perencana sebagai pelaksana perencanaan pembangunan daerah.

3. Sinergitas antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta antar Provinsi dengan Pemerintah Pusat.
4. Kualitas rencana yang perlu ditingkatkan dengan memaksimalkan analisa terhadap indikator-indikator pembangunan yang digunakan sebagai ukuran keberhasilannya.
5. Hasil Pengendalian dan Evaluasi terhadap proses perencanaan pembangunan daerah sampai dengan pelaksanaannya, menjadi masukan perbaikan dalam penyusunan perencanaan yang akan datang.

4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat ini menjelaskan kinerja yang dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2018. Pencapaian kinerja ini jika dibandingkan dengan penetapan kinerja pada awal tahun memberikan gambaran tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Dengan melakukan analisis terhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja kita dapat mendeteksi kelemahan-kelemahan yang ada sehingga dapat diantisipasi dengan perbaikan-perbaikan kinerja untuk masa depan. Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman kepada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 065/ 3979/ED/GSB-2019 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Dan Penyampaian Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- **a.** Gambaran organisasi yang terdiri atas dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia.
- **b.** Aspek strategis organisasi
- **c.** Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Metodologi pengukuran pencapaian target kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis

b. Hasil Pengukuran Kinerja

c. Capaian Kinerja Organisasi

Menjelaskan tentang capaian kinerja Bappeda tahun 2019 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. dan analisis pencapaian sasaran strategis yang meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen Perubahan Renstra Bappeda 2016-2021;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

d. Realisasi Anggaran

Menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Bappeda sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Memuat simpulan atas capaian kinerja serta langkah mendatang yang akan dilakukan Bappeda untk meningkatkan kinerja.

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan mengingat perubahan dinamika masyarakat yang begitu cepat yang pada dasarnya menuntut pelaksanaan pemerintahan yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang prima dari aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2016-2021 sebagai berikut:

2.1.1 Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi merupakan inspirasi dari motivasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan apa yang ingin dicapai dimasa depan, sedangkan misi diperlukan sebagai pedoman didalam pengambilan keputusan manajemen.

Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021, adalah :

> ***" Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera "***

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Madani ;**

   Sumatera Barat Madani adalah suatu masyarakat yang berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan. Masyarakat madani menghormati pluralistis, bersikap terbuka dan demokratis serta selalu bergotong royong menjaga kedaulatan negara. Dengan

demikian, masyarakat madani tersebut pada dasarnya adalah masyarakat yang agamais yang ditandai oleh adanya keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, lahir dan batin serta material dan sipiritual

2. **Sejahtera**

   Sumatera Barat Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersediannya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

   Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu sarana dan prasarana dalam usaha memenuhi kebutuhan dasar harus terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuyk mencapai kemajuan dan perkembangan bagi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

2.1.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Visi sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada RPJMD Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan daerah;

5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

2.1.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat

A. Tujuan

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016-2021, maka tujuan jangka menengah Bappeda Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas.
2. Meningkatnya kinerja organisasi.

B. Sasaran

Berdasarkan hasil analisis melalui pendekatan *logical framework*, maka sasaran yang ingin dicapai Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dijabarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke					
					1	2	3	4	5	6
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian	%	100	100	100	100	100	100

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun ke					
					1	2	3	4	5	6
			sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS							
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya kinerja kelembagaan yang baik	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	BB	BB	BB	A	A
			Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	%	90	93	94	95	96	96

2.1.4. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

Untuk mendukung upaya pencapaian Tujuan dan Sasaran jangka menengah, maka disusunlah strategi dan kebijakan sebagai berikut:

A. Strategi

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi yang akan ditempuh dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas setiap tahun selama periode 2016-2021 adalah:

1) Penguatan kelembagaan melalui pengimplementasian SOP kerja Bappeda
2) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparat perencana dalam diklat perencanaan pembangunan
3) Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai
4) Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan
5) Penyajian laporan yang lengkap, jelas dan terukur dan tepat waktu
6) Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT).
7) Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi
8) Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat,

kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif

9) Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan
10) Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan
11) Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaanpembangunan daerah
12) Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistime-monev
13) Membangun karakter (*caracter building*) ASN Bappeda.
14) Penyelenggaraan sosialisasi dan konsultasi public dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
15) Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku
16) Meningkatkan peranan Sisem Pengendalian Interen Pemerintah

B. Kebijakan

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut:

1) Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatur
2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda
3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN
4) Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
5) Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan
6) Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
7) Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan yang transparan, akuntabel,dan akurat

8) Menerapkan e-planning dan e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
9) Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT)
10) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah
11) Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan
12) Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
13) Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota se Sumatera Barat
14) Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem *e-monev*
15) Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan caracter building ASN
16) Penegakan penerapan peraturan keuangan
17) Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	• Optimalisasi hasil pengendalian dan evaluasi	• Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan secara konsisten dan berkelanjutan
		• Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dalam perencanaan pembangunan	• Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan yang transparan, akuntabel, dan akurat
		• Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database	• Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antara provinsi dengan kabupaten/kota se

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Sumatera Barat
		• Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistim e-monev	• Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem *e-monev*
		• Implementasi perencanaan pembangunan berbasis sistem informasi (IT)	• Menerapkan e-planning dan e-budgeting (SIPKD) secara terintegrasidalam proses penyusunan perencanaan pembangunan
		• Terpublikasinya dokumen perencanaan pembangunan di berbagai media informasi	• Optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bappeda • Publikasi proses penyusunan dokumen perencanaan di berbagai media, seperti website, media cetak dan elektronik
		• Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat, kabupaten/kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif	• Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah • Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan
		• Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunaan	• Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi .	• Menyajikan laporan yang lengkap, jelas dan terukur	• Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda • Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan
		• Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang mendukung kinerja pegawai	• Inventarisasi dan pendayagunaan serta pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor
		• Penyempurnaan dan penerapan SOP Bappeda	• Evaluasi dan revisi SOP Bappeda • Penerapan SOP secarakonsisten
		• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur perencana	• Partisipasi ASN Perencanadalampelatihandanbimtekperencanaan • Peningkatan kuantitas dan kualitas fungsional perencana
		• Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan	• Penetapan kinerja Bappeda dan individu aparatur • Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan
		• Membangun karakter (*caracter building*) ASN Bappeda.	• Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh ASN • Membangun iklim kerja yang mendukung integritas dan • *caracter building* ASN

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		• Kesesuaian penatausahaan keuangan dengan aturan yang berlaku	• Penegakan penerapan peraturan keuangan
		• Meningkatkan peranan SPIP	• Penerapan SPIP dalam setiap kegiatan

2.1.5 RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Penetapan rencana kinerja untuk tahun 2019 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategis 2016-2021 seperti pada Tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3.
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2019

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	%	100
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya kinerja kelembagaan yang baik	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB
			Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	%	95

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target tahunan pada dokumen perencanaan jangka menengah sebagaimana yang terdapat dalam Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, maka ditetapkan beberapa program dan kegiatan yang menjadi Perjanjian Kinerja antara Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat.

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2019. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan ikhtisar rencana kerja yang akan dicapai pada tahun 2019. Untuk lebih jelasnya Perjanjian Kinerja terdapat pada Tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target
Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	100
Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB
	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	95

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja ini, Bappeda mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 15.202.522.972, pada APBD 2019 dan bertambah menjadi Rp 17.626.886.315,- pada APBDP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5.
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2019

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)	Ket
1.	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	1. Program Pengembangan Data/Informasi Pembangunan 2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	435.920.000,- 2.003.481.839,- 6.073.417.468,-	APBD
3.	Meningkatkan tata kelola organisasi	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.063.798.308,- 2.036.182.933,- 71.250.000,- 184.624.800,- 758.210.967,-	APBD
	Jumlah		**17.626.886.315,-**	

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA

Metodologi pengukuran pencapaian target kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan mencapai sasaran strategis dan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan tersebut. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan pencapaian indikator kinerja dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	> 100%	Amat Baik
2.	85% ≥ n ≤ 100%	Baik
3.	< 85%	Tidak Baik

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Provinsi Sumatera Barat diukur dari pencapaian sasaran strategis, yang berjumlah 2 (dua) sasaran strategis. Setiap sasaran strategis diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya dan pencapaian indikator kinerja ditentukan oleh program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat/Bidang.

Untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis, Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2019 melaksanakan program/kegiatan pembangunan seperti yang telah

dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Masing-masing program kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yang telah dilaksanakan sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, antara lain dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS
3	Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
			Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu

3.2.1. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat meliputi 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran sebagai alat ukurnya sebagaimana bisa dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Sasaran Strategis
Terhadap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi	%
1	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	%	100	100	100
2	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB	100	100
		Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu	%	95	96.30	101,36
Rata-rata capaian						100,68

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian dari indikator Sasaran Strategis 1 (Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan) adalah dengan predikat **baik** (100%), dan sasaran strategis 2 (Meningkatkan tata kelola organisasi) dengan predikat **amat baik** (101,36%). Dengan demikian pencapaian indikator sasaran strategis Bappeda secara rata-rata adalah **amat baik** (100.68%).

3.2.2. Analisis Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan

Salah satu keberhasilan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyusun perencanaan, maka sasaran kinerja Bappeda salah satunya adalah bagaimana mewujudkan perencanaan yang berkualitas.

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang pertama ini ditetapkan melalui indikator kinerja :

1) **Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** dengan tolak ukurnya meliputi :

   a) **Kesesuaian sasaran dan indikator RPJMD dengan Renstra**

   Sasaran dan indikator sasaran pada Renstra OPD telah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dimana penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD. Substansi yang terdapat dalam RPJPD dijabarkan kedalam Restra OPD sebagai wujud kontribusi OPD dalam melasaksanakan RPJMD, dapat terlihat sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4
Kesesuaian sasaran dan indikator RPJMD dengan Renstra

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas I : Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Persentase Peningkatan Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat (Baznas).	Biro Bintal dan Kesra	100	100
				Peringkat Kafilah Sumatera Barat dalam MTQ Nasional	Biro Bintal dan kesra	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta kepemudaan	Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi berangkat haji	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Sekolah Menengah dengan system boarding scholl yang bernuansa islami	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang bernuansa islami	Dinas Pendidikan	100	100
		Sekolah Menngah yang bernuansa islami	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau	Dinas Pendidikan	100	100
		Pondok pesantren dengan system boarding school	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren dan sekolah agama	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikanny a Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumbar	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Badan Kesbangpol	100	100
		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.	Badan Kesbangpol	100	100
		Konflik social	Meningkatnya Keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
			Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Dinas Pol PP dan Damkar	100	100
3	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : - Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Badan Kesbangpol	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Badan Kesbangpol	100	100
		Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang adat dan budaya minangkabau	Dispora	100	100
				Meningkatnya kreatifitas pemuda yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional	Dispora	100	100
			Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat	Indeks penegakan Peraturan daerah	Dinas Satpol PP	100	100
			Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi	Dinas Satpol PP	100	100
			Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumbar	Persentase penurunan kasus maksiat di Provinsi Sumatera Barat	Dinas Satpol PP	100	100
		Penanganan	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Dinas Sosial	100	100
		Rehabilitasi	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)yang mandiri	Dinas Sosial	100	100
4.	Meningkatnya kesalehan sosial Masyarakat dalam penanganan masalah sosial	Persentase pendistribusian zakat, infak dan sedekah	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan penyaluran zakat dari badan amil zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
5	Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya : MUI, KAN		Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya :MUI, KAN	Biro Bintal dan Kesra	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu, KAN, LPM	DinasPMD	100	100
6.	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah mata budaya	Dinas Kebudayaan	100	100
		Peningkatan event seni dan budaya	Meningkatnya diplomasi budaya dalam dan luar negeri	Jumlah event/diplomasi budaya	Dinas Kebudayaan	100	100
		Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan warisan	Jumlah warisan budaya yang dilindungi : - Cagar Budaya yang dilindung - WBTB yang ditetapkan	Dinas Kebudayaa	100	100
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
				Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100
		Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Standar 40 atau 80 PL/orang/ tahun	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun	BPSDM	100	100
		Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persayaratan jabatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100
				Akreditasi pelatihan pada BPSDM	BPSDM	100	100
		Perangkat daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70%	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
				Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	BKD	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	Pegawai yang mencapai kinerja baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	Inspektorat	100	100
				Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100
		Perangkat Daerah Prov menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara-an pemerintahan	Opini BPK	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	Bakeuda	100	100
				Persentase Rasio SILPA dari Belanja Daerah	Bakeuda	100	100
				Persentase Tepat Waktu Penyampaian Ranperda APBD, APBD-P ke DPRD	Bakeuda	100	100
				Persentase Tepat Waktu Penyampaian Pertanggung jawaban APBD ke DPRD	Bakeuda	100	100
		Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP)	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, OPD Provinsi dan Kab/Kota	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Inspektorat	100	100
			Meningkatanny a Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	Biro Organisasi	100	100
				Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB	Biro Organisasi	100	100
				Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan SAKIP	Biro Organisasi	100	100
		Tingkat Kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat	100	100
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Penggunaan E-Procurement terhadap pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya mutu pelelangan barang dan jasa pemerintah	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seluruh SKPD berdasarkan Perpres	Biro AP2BMD	100	100
		Indeks e-Government Provinsi	Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas	100	100
		Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Huma	100	100
				Penyebarluasan Provinsi Sumatera Barat	Biro Humas	100	100
		Instansi Pemerintah yang memilki Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B keatas)	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
		Tertib Arsip	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	100	100
4	Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100
		Pencapaian sasaran pembangunansesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100
		Meningkatnya ketersediaan dan kuaalitas Produk Hukum dengan yang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan	Produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dantidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
				Jumlah Inovasi pelayanan tercipta pada UKPP Provinsi dan Kab/Kota melalui kompetisi pelayanan prima dan Inovasi pelayanan publik	Biro Organisasi	100	100
		Rata-rata Indeks kepuasan masyarakat (74 Unit kerja pelayanan publik)		Hasil Penilaian Survey Kepusasan Masyarakat.	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3: **Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan**							
1	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan	100	100
		Harapan lama sekolah		Harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan	100	100
		Rata-rata lama sekolah	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Rata-rata lama sekolah Dikmen	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	100	100
				Indek Integritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
			Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikanny a Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat	Dinas Pendidikan	100	100
				Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti	Dinas Pendidikan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	100	100
				Indek Itregritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
				Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya	Dinas Pendidikan	100	100
				Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami	Dinas Pendidikan	100	100
				Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau	Dinas Pendidikan	100	100
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
				APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah		Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus SMA		Angka Putus Sekolah di SMA/SMK	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus SMK					
4	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peringkat UN di tingkat nasional	Dinas Pendidikan	100	100
				Angka Kelulusan SMA/MA	Dinas Pendidikan	100	100
				Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri	Dinas Pendidikan	100	100
		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)		Angka Kelulusan SMK	Dinas Pendidikan	100	100
				Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Jumlah kunjungan perpustakaan	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
				Jumlah Anggota Baru	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam	Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
				Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
			Mewujudkan Perpustakaan Digital	Jumlah Entrian Database Bahan Pustaka	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
6	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan IPTEK	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Dalam Pengembilan Kebijakan Pembangunan	Balitbang	100	100
Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Angka harapan hidup	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	Dinas Kesehatan	100	100
				Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF)	Dinas Kesehatan	100	100
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	RSUD Solok	100	100
				Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	100	100
		Rumah Sakit Provinsi Terakreditasi	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	100	100
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Dinas Kesehatan	100	100
				Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi	RSUD Solok	100	100
				Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	RSUD Solok	100	100
				Av Los	RSJ HB Saanin	100	100
			Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Indek Kepuasan Masyarakat	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100
				Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Tingkat Akreditasi Rumah Sakit	RSUD Pariaman	100	100
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD Pariaman	100	100
			Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSJ HB Saanin	100	100
		Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan		100
2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang, berkualitas dan berdaya saing dengan pengendalian kualitas penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	DPPKBKPS	100	100
		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)		CPR (Prelevansi Pemakaian Kontrasepsi)	DPPKBKPS	100	100
		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)		Unmeet Need (Kebutuhan ber-KB)	DPPKBKPS	100	100
		ASFR 15-19 tahun			DPPKBKPS	100	
		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)			DPPKBKPS	100	
		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)		Laju Perttumbuhan Penduduk (LPP)	DPPKBKPS	100	100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Capaian Medali Emas dalam Kejurnas PPLP	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Nasional Kejurnas Antar PPLP POPNAS POPWIL Peparpelnas Peparnas Pornas Soina	Dinas Pemuda dan Olahraga		100
				Jumlah Atlet Sumatera Barat yang mewakili Indonesia di Event Olahraga Tingkat Internasional	Dinas Pemuda dan Olahraga		
4	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Peran pemuda dalam pembangunan (organisasi kepemudaan yang aktif)	Meningkatnya Pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	jumlah pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	Dinas Pemuda dan Olahraga	100	100
5	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Persentase organisasi perempuan yang aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Persentase OPD yang menerapkan anggaran berbasis gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Partisipasi angkatan kerja perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
				Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100
				Persentase Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		100
Prioritas 5 : **Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**							
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya diversifikasi pangan	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Dinas Pangan	100	100
		Persentase peningkatan produksi : a. Padi b. Jagung c. Cabe d. Daging e. Telur f. Ikan		Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) a. Konsumsi Energi b. Konsumsi Protein	Dinas Pangan	100	100
			Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Mempertahankan ketersediaan minimal terhadap energi dan protein a. Konsumsi Energi b. Konsumsi Protein	Dinas Pangan	100	100
				Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumbar	Dinas Pangan	100	100
			Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan	Terataasinya masyarakat rawan pangan	Dinas Pangan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	a. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Dinas Pangan	100	100
				b. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	Dinas Pangan	100	100
			Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	a. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	Dinas Pangan	100	100
				b. Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	Dinas Pangan	100	100
2	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi b. Persentase Peningkatan Kawasan Agribisnis	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Distanhorbun	100	100
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Pemberdayaan penyuluh	Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan	Distanhorbun	100	100
			Berkembangnya pertanian organik	Bertambahnya luasan pertanian organik	Distanhorbun	100	100
			Meminimalkan luas serangan yang disebabkan OPT dan bencana alam	Persentase penurunan luas serangan hama dan penyakit tanaman	Distanhorbun	100	100
			Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	a. Peningkatan Produksi Daging	DPKH	100	100
				b. Peningkatan Produksi Telur	DPKH	100	100
				c. Peningkatan Populasi Ternak Sapi	DPKH	100	100
			Meningkatnya produktifitas ternak	a. Service per conception (S/C) (jumlah pelayanan kawin per kebuntingan)	DPKH	100	100
				b. Persentase anak yang lahir dari embrio transfer pada ternak sapi	DPKH	100	100
			Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	Jumlah peternak yang memiliki sertifikasi farm di Sumatera Barat	DPKH	100	100
			Meningkatnya status kesehatan hewan	a. Tingkat kejadian kasus penyakit brucellosis dan hog cholera	DPKH	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				b. Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis	DPKH	100	100
			Meningkatnya uni usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi	Persentase unit usaha produk hewan yang memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Sertifikat Halal dan ISO	DPKH	100	100
Prioritas 6 : **Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Pertumbuhan ekonomi	Peningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi	Lintas Perangkat OPD	100	100
		PMA		a. PMA		100	100
		PMDN		b. PMDN		100	100
				Persentase izin penanaman modal	DPM dan PTSP	100	100
			Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Jumlah calon investor yang berminat serius	DPM dan PTSP	100	100
				Jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip	DPM dan PTSP	100	100
			Meningkanya kualitas pelayanan satu pintu	Persentase penyelsaian masalah penanaman modal	DPM dan PTSP	100	100
			Meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu	Persentase perizinan yang diberikan tepat waktu	DPM dan PTSP	100	100
				Indes Kepuasan Masyarakat (IKM)	DPM dan PTSP	100	100
		Peningkatan Nilai Ekspor	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.	Peningkatan omzet pasar rakyat	Dinas Perindag	100	100
				Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Dinas Perindag	100	100
				Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi)	Dinas Perindag	100	100
		PDRB per Kapita	Meningkatnya kinerja perdagangan luar negeri.	Nilai ekspor bersih perdagangan	Dinas Perindag	100	100
				Jumlah sertifikat mutu produk yang diterbitkan	Dinas Perindag	100	100
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Nusantara	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	Dinas Pariwisata	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Mancanegara	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)	Dinas Pariwisata	100	100
			Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara per kunjungan (Triliun Rp)	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : **Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Peningkatan Nilai Ekspor	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dalam negeri dan luar negeri	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani(IKU)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya laut	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
			Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
			Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan dan bantuan sosial	Dinas Sosial	100	100
				Jumlah Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha	Dinas Sosial	100	100
				Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terlayani	Dinas Sosial	100	100
				Jumlah WRSE yang Bimbingan Teknis dan bantuan Sosial	Dinas Sosial	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Jumlah Kab/Kota yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial	Dinas Sosial	100	100
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	Persentase Tenaga kerja yang berkompeten	Disnakertrans	100	100
				Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan pemagangan	Disnakertrans	100	100
				Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan produktivitas	Disnakertrans	100	100
				Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi	Disnakertrans	100	100
			Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan tenaga kerja sektor formal	Disnakertrans	100	100
				Persentase Serapan tenaga kerja sektor informal	Disnakertrans	100	100
				Persentase Pendidikan BKK di SMK/ perguruan tinggi/ lembaga	Disnakertrans	100	100
				Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia kerja	Disnakertrans	100	100
				Persentase Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat	Disnakertrans	100	100
				Persentase Tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai tata cara/mekanisme pengguna tenaga kerja asing	Disnakertrans	100	100
3	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	Meningkatnya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Jumlah tercapainya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
Prioritas 9 : **Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**							
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi	Persentase peningkatan Penumpang terangkut a. Dara b. Laut c. Udara d. ASDP e. KA	Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi	Persentase penumpang terangkut transportasi publik a. Darat b.Laut c.Udara d.ASDP e.KA	Dinas Perhubungan	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Rasio angka kecelakaan lalu lintas (kematian per 10.000 registrasi kend)	Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata Indeks kinerja infrastrukur irigasi provinsi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	Dinas PSDA	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
		Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan - air minum - Rumah tangga bersanitasi - Penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Dinas PUPR	100	100
				Persentase cakupan air minum	Dinas PUPR	100	100
				Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Dinas PUPR	100	100
			Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100
			Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100
				Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		100	100
6	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Rasio elektrifikasi	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100
				Jumlah Infrastruktur EBT - PLTMH - PLTS	Dinas ESDM	100	100
Prioritas 10 : **Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam**							
1	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangun an dan tata ruang	Peningkatan Kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Dinas PUPR	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Dinas Lingkungan hidup	Terkendali nya beban pencemaran dan kerusakan Dinas Lingkungan hidup dari usaha/kegia tan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Indeks Kualitas Udara (IKU)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
			Meningkatnya pencegahan dampak lingkungan dan konservasi SDA sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan Dinas Lingkungan hidup	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Dinas Lingkungan hidup Strategis	Dinas Lingkungan hidup	100	100
			Penurunan dampak lingkungan akibat timbulan sampah dan limbah B3	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade adipura dan gerakan sumber bersih	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase penurunan volume sampah melalui imolementasi 3 R (redice, reuse, recyle)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentse peningkatan limbah B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dinas Lingkungan hidup	100	100
			Meningkatnya efektifitas penanganan kasus Lingkungan hidup dan penaatan hukum Lingkungan hidup	Persentase kasus Lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase kasus lingkungan hidup yang dapat diselesaikan sesuai SOP	Dinas Lingkungan hidup	100	100
			Meningkatnya peran aktif masyarakt dan stakeholder dalam pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	Dinas Lingkungan hidup	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	Dinas Lingkungan hidup	100	100
				Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	Dinas Lingkungan hidup	100	100
3	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani		Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	Dinas Kehutanan	100	100
			Terwujudnya kepastian dan optamalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukan nya	Persentase unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya	Dinas Kehutanan	100	100
				Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Dinas Kehutanan	100	100
				Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Dinas Kehutanan	100	100
			Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat/ kemitraan	Dinas Kehutanan	100	100
4	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	Meningkatnya Kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencanan	BPBD	100	100
5	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana(%)	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	BPBD	100	100

No	RPJMD		Renstra		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulang an bencana (%)	Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	BPBD	100	100
			Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	BPBD	100	100
6	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum	Meningkatnya tampungan sumber-sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
			Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas PSDA	100	100
			Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
7	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Meningkat nya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan dan Perikanan	100	100

Perbandingan Indikator Kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra pada tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra -	100 100	100 100	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra pada tahun 2018 dengan tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	100 100	100 100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Renstra Bappeda pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2019		Renstra Bappeda	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan Renstra	100 100	100 100	100 100	100 100

b) Kesesuaian sasaran dan indikator Renstra dengan Renja

Renstra merupakan rencana srategis OPD yang bersifat jangka menengah sebagai wujud implementasi dari RPJMD. Renstra tersebut dijabarkan kedalam perencanaan tahunan yang dikenal dengan Renja. Sasaran dan indikator sasaran yang terdapat pada Renja OPD haruslah mempedomani dan mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra masing-masing OPD. Penjabarannya telah mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8
Kesesuaian sasaran dan indikator Renstra dengan Renja

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 1: **Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat**							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan	Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan	Zakat yang dikelola Badan Amil Zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
	ajaran agama dalam kehidupan masyarakat		ajaran agama dalam kehidupan masyarakat				
2	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase penyaluran zakat, infak dan sedekah	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyaaraat	Persentase penyaluran zakat, infak dan sedekah	Biro Bintal dan Kesra	100	100
3	Terwujudnya peningkatan layanan bidang sosial, budaya, agama, kesehatan dan pendidikan serta pemuda	Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi berangkat haji		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi berangkat haji	Biro Bintal dan Kesra	100	100
4	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang bernuansa islami	Meningkatnya integrritas peserta didik	Indek integritas siswa	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yang bernuansa surau	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yng bernuansa islami	Dinas Pendidikan	100	100
6	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Tersusunya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter disetiap satuan pendidikan	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan pemhaman dan da penagganan nilai-nilai buaya bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	100	100
7	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikanny a Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah	Meningkatkan penumbuh kembangkan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yang bernuansa islam	Dinas Pendidikan	100	100
8	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban masyarakat	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Badan Kesbangpol	100	100
9	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Badan Kesbangpol	100	100
10	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
11	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	Dinas Satpol PP	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
12	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Badan Kesbangpol	100	100
13	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	Badan Kesbangpol	100	100
14	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang adat dan budaya minangkabau	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya pemahaman pemuda tentang adat dan budaya minangkabau	Dispora	100	100
15	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya kreatifitas pemuda yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional	Terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas pemuda dibidang seni budaya dan industry kreatif	Meningkatnya kreatifitas pemuda yang berdaya saing tingkat nasional dan internasional	Dispora	100	100
16	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Dinas sosial	100	100
17	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)yang mandiri	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)yang mandiri	Dinas sosial	100	100
18	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan penyaluran zakat dari badan amil zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran gama dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan Kesra	100	100
19	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Biro Bintal dan kesra	100	100
20	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya : - MUI - KAN	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya : - MUI - KAN	Biro Bintal dan Kesra	100	100
21	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu, KAN, LPM	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu KAN, LPM,	Dinas PMD	100	100
		Peningkatan partisipasi perantau dalam proses pembangunan		Peningkatan partisipasi perantau dalam proses pembangunan	Biro Kerjasama Pembangun an dan Rantau	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
22	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah mata budaya	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Jumlah mata budaya	Dinas Kebudayaan	100	100
23	Meningkatnya diplomasi budaya dalam dan luar negeri	Jumlah event/diplomasi budaya	Meningkatnya diplomasi budaya dalam dan luar negeri	Jumlah event/diplomasi budaya	Dinas kebudayaan	100	100
24	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya	Jumlah warisan budaya yang dilindungi : - Cagar Budaya yang dilindungi -WBTB yang ditetapkan	Meningkatnya pelestarian dan pengembangan warisan budaya	Jumlah warisan budaya yang dilindungi : - Cagar budaya yang dilindungi - WBTB yang ditetapkan	Dinas Kebudayaan	100	100
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
		Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100
3	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur	Persentase ASN Prov. Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/tahun	BKD	100	100
4	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100
				Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	BPSDM	100	100
		Akreditasi pelatihan pada BPSDM	Meningkatnya pengembangan kompetensi dan kualifikasi dan aparatur	Persentase lulusan diklat dengan predikat minimal memuaskan	BPSDM	100	100
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen SDM aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
		Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	Meningkatnya dukungan tata kelola	Persentase formasi jabatan struktural yang terisi sesuai dengan kompetensi jabatan	BKD	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
6	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan material	Meningkatnya peran inspektorat provinsi dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Persentase pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dapat ditangani dalam waktu sesuai standar	Inspektorat	100	100
		Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100
7	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada OPD Provinsi Sumatera Barat	OPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100
8	Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi, OPD Provinsi dan Kab/Kota	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Meningkatnya Akunntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi sumatera barat	Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas	Inspektorat	100	100
9	Meningkatanny a Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan Reformasi Birokrasi	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	Meningkatnya kualitas akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan SKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Provinsi	Biro Organisasi	100	100
		Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB		Persentase OPD yang memperoleh nilai evaluasi AKIP BB	Biro Organisasi	100	100
		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan SAKIP		Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dalam penerapan SAKIP	Biro Organisasi	100	100
10	Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah dibidang pengawasan	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya penerapan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah pada Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Inspektorat	100	100
11	Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Meningkatnya ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan daerah	Persentase rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan dipemerintahan provinsi yang dapat ditindaklanjuti	Inspektorat	100	100
12	Meningkatnya mutu pelelangan barang dan jasa pemerintah	Persentase Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seluruh SKPD berdasarkan Perpres	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu	Biro AP2BMD	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
13	Meningkatnya nilai Indeks Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Sumatera Barat	Indeks e-Government Provinsi	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas	100	100
14	Meningkatnya nilai Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat	Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Humas	100	100
		Penyebarluasan Provinsi Sumatera Barat		Penyebarluasan Provinsi Sumatera Barat	Biro Humas	100	100
15	Meningkatnya Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
16	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan professional	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
17	Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Mewujudkan pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis	Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan perpustakaan	100	100
18	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas dengan kesesuaian antar dokumen	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100
19	Meningkatkan tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya penyelenggaraan kinerja pemerintahan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100
20	Produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Terbentuknya produk hukum provinsi dalam rangka klarifikasi oleh tingkat pusat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
21	Produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dantidak bertentangan dengan kepentingan umum	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Terbentuknya produk hukum Kabupaten/Kota sesuai dengan hasil klarifikasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengawasan oleh provinsi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
22	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi	Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
		Jumlah Inovasi pelayanan tercipta pada UKPP Provinsi dan Kab/Kota melalui kompetisi pelayanan prima dan Inovasi pelayanan publik		Jumlah Inovasi pelayanan tercipta pada UKPP Provinsi dan Kab/Kota melalui kompetisi pelayanan prima dan Inovasi pelayanan publik	Biro Organisasi	100	100
		Hasil Penilaian Survey Kepusasan Masyarakat.		Hasil Penilaian Survey Kepusasan Masyarakat.	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3: **Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan**							
1	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Rata-rata lama sekolah Dikmen	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	Rata-rata lama sekolah Dikmen	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Sekolah Menengah Terakreditasi minimal B	Dinas Pendidikan	100	100
		Indek Integritas Siswa		Indek Integritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
3	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikanny a Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Terimplementasikannya Pergub No 73 tahun 2010 tentang pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah/madrasah sumatera barat	Dinas Pendidikan	100	100
		Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti		Terlaksananya Permendikbud No 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti	Dinas Pendidikan	100	100
		Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan		Tersusunnya program kerja dan pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter di setiap satuan pendidikan	Dinas Pendidikan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Indek Itregritas Siswa		Indek Itregritas Siswa	Dinas Pendidikan	100	100
		Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya		Peningkatan Pemahaman dan Penetapan Nilai-nilai Budaya	Dinas Pendidikan	100	100
		Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami		Sekolah Menengah dengan sistim Boarding Scool yang Bernuasa Islami	Dinas Pendidikan	100	100
		Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau		Sekolah Menengah yang Bernuansa Surau	Dinas Pendidikan	100	100
4	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C	Meningkatkan Akses dan Pemerataan Pendidikan Menengah	APK SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
		APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C		APM SMA/SMK/MA/SMALB/ Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah		Angka tidak melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus Sekolah di SMA/SMK		Angka Putus Sekolah di SMA/SMK	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peringkat UN di tingkat nasional	Meningkatkan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing Pendidikan Menengah	Peringkat UN di tingkat nasional	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Kelulusan SMA/MA		Angka Kelulusan SMA/MA	Dinas Pendidikan	100	100
		Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri		Lulusan sekolah menengah yang diterima di Perguruan Negeri	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Kelulusan SMK		Angka Kelulusan SMK	Dinas Pendidikan	100	100
		Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri		Lulusan SMK yang diterima di Dunia Usaha dan Industri	Dinas Pendidikan	100	100
6	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Jumlah kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca	Jumlah kunjungan perpustakaan	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
		Jumlah Anggota Baru		Jumlah Anggota Baru	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
7	Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam	Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	Bertambah dan terpeliharanya bahan pustaka dalam bentuk koleksi karya tulis dan karya cetak dan atau karya rekam	Jumlah Penambahan Koleksi Bahan Pustaka	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
		Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara		Jumlah Koleksi bahan pustaka yang terpelihara	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
8	Mewujudkan Perpustakaan Digital	Jumlah Entrian Database Bahan Pustaka	Mewujudkan Perpustakaan Digital	Jumlah Entrian Database Bahan Pustaka	Dinas Kerasipan dan Perpustakaan	100	100
9	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Dalam Pengembilan Kebijakan Pembangunan	Meningkatnya Fungsi Penelitian dan Pengembangan serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti Dalam Pengembilan Kebijakan Pembangunan	Balitbang	100	100
Pioritas 4: **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun	Meningkatnya kesehatan ibu dan anak		Dinas Kesehatan	100	100
		Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Di Faskes (PF)		Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan difaskes	Dinas Kesehatan	100	100
		Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Sesuai Standar		Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1)	Dinas Kesehatan	100	100
2	Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah sakit yang terakreditasi	Meningkatnya kwalitas pelayanan	Akreditasi RS	RSUD Solok	100	100
		Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	Meningkatnya mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar	Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal 1 per kecamatan	Dinas Kesehatan	100	100
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Indek Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Mutu Pelayanan kesehatan rujukan sesuai standar	Indek Kepuasan Masyarakat	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100
		Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Terakreditasinya RS	RSUD Achmad Muchtar Bukittinggi	100	100
		Tingkat Akreditasi Rumah Sakit		Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah sakit	RSUD Pariaman	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSUD Pariaman	100	100
4	Meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RSJ HB Saanin	100	100
5	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Persentase Masyarakat yang Memiliki Jaminan Kesehatan	Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan program jaminan kesehatan sumbar Sakato	Persentase kepesertaan sistim jaminan sosial nasional BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100
6	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Nasional - Kejurnas Antar PPLP - POPNAS - POPWIL - Peparpelnas - Peparnas - Pornas Soina	Meningkatnya Prestasi Olahraga di tingkat Nasional dan Internasional	Peringkat Sumatera Barat pada event Olahraga Nasional - Kejurnas Antar PPLP - POPNAS - POPWIL - Peparpelnas - Peparnas - Pornas Soina	Dinas Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga	100 100	100 100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Jumlah Atlet Sumatera Barat yang mewakili Indonesia di Event Olahraga Tingkat Internasional					
7	Meningkatnya Pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	Jumlah pemuda yang berkarakter dan mandiri yang berdaya saing	Meningkatnya pemuda berkarakter dan mandiri	Jumlah pemuda berkarakter dan mandiri	Dinas Pemuda dan Olahraga	100	100
8	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Meningkatnya kualitas hidup perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) (IKU)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (IKU)		100	100
		c. Persentase organisasi perempuan yang aktif		c. Persentase organisasi perempuan yang aktif		100	100
		d. Persentase OPD yang		d. Persentase OPD yang		100	100
		e. menerapkan anggaran berbasis gender		e. menerapkan anggaran berbasis gender		100	100
		f. Partisipasi angkatan kerja perempuan		f. Partisipasi angkatan kerja perempuan		100	100
		g. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen		g. Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen		100	100
9	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Rasio Perempuan korban kekerasan per 100.000 penduduk (usia 18 tahun ke atas)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
10	Meningkatnya kualitas keluarga	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	Meningkatnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera	Persentase Penyedia Layanan Bagi Keluarga Mewujudkan KG dan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
11	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Meningkatnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
12	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki data terpilah	Meningkatnya pemanfaatan data terpilah	Persentase satuan kerja perangkat daerah provinsi yang memiliki data terpilah	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
13	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	Meningkatnya perlindungan khusus anak	Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak (usia kandungan – 18 tahun)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
Prioritas 5 : **Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**							
1	Meningkatna diversifikasi pangan	Meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Pemanfaatan Pekarangan dalam Pengembangan Pangan (P-KRPL)	Tumbuh dan berkembangnya kelompok pemanfaatan pekarangan penerima manfaat	Dinas Pangan	100	100
		Konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) a. Konsumsi Energi b. Konsumsi Protein	Pemasyarakatan Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya upaya-upaya pemasyarakatan konsumsi pangan B2SA melalui berbagai bentuk dan media.	Dinas Pangan	100	100
2	Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam	Mempertahankan ketersediaan minimal terhadap energi dan protein c. Konsumsi Energi d. Konsumsi Protein	Pengembangan pangan lokal melalui kerjasama dengan dengan perguruan tinggi	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pangan lokal sebagai alternatif pengganti beras dan terigu	Dinas Pangan	100	100
		Meningkatnya cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumbar			Dinas Pangan	100	100
3	Meningkatnya penanganan masyarakat rawan pangan	Teratasinya masyarakat rawan pangan	Penyediaan dan Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Tersedianya dan tersalurkannya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Dinas Pangan	100	100
4	Stabilnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen	a. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di tingkat konsumen	Pemantauan Harga dan Pengembangan JIH Wilayah	Terselenggaranya pemantauan harga pangan dan jaringan informasi harga di Kab/Kota	Dinas Pangan	100	100
				Tersedianya hasil dan analisis tentang harga pangan sebagai bahan perumusan kebijakan	Dinas Pangan	100	100
		b. Stabilisasi harga bahan pangan pokok (gabah dan beras) di tingkat produsen	Menyusunan Prognosa neraca harga pangan	Tersedianya data prognosa neraca harga pangan untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga pangan	Dinas Pangan	100	100
5	Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	a. Tersedianya pangan segar yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat	Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar	Sampel Uji	Dinas Pangan	100	100
		b. Persentase bahan pangan yang aman dikonsumsi masyarakat	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar	Terlaksananya surveilen kebun pelaku usaha pangan segar hasil pertanian yang telah memiliki sertifikat prima	Dinas Pangan	100	100
6	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura	Meningkatnya produksi Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	Persentase peningkatan kawasan sentra produksi TPH	Distanhorbun	100	100
				Persentase peningkatan kawasan sentra produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
7	Pemberdayaan penyuluh	Persentase kawasan terintegrasi dalam melaksanakan optimalisasi penyuluhan	Peningkatan SDM Aparatur dan pelaku usaha pertanian	Persentase kawasan peningkatan SDM Aparatur dan pelaku usaha pertanian	Distanhorbun	100	100
8	Berkembangnya pertanian organik	Bertambahnya luasan pertanian organik	Berkembangnya pertanian organik	Berkembangnya pertanian organik melalui SLAPO dan demplot sayuran organik	Distanhorbun	100	100
				Berkembangnya pertanian organik melalui Sertifikasi pertanian organik	Distanhorbun	100	100
9	Meminimalkan luas serangan yang disebabkan OPT dan bencana alam	Persentase penurunan luas serangan hama dan penyakit tanaman	Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Gerakan Pengendalian Hama Utama Tanaman Perkebunan	Distanhorbun	100	100
10	Meningkatnya produksi dan populasi peternakan	a. Peningkatan Produksi Daging	Pengembangan Kawasan Sentra produksi Peternakan	Meningkatnya Kawasan Sentra Produksi Peternakan	DPKH	100	100
		b. Peningkatan Produksi Telur		Meningkatnya Pengembangan Kawasan Agribisnis Unggas	DPKH	100	100
		c. Peningkatan Populasi Ternak Sapi		Meningkatnya Kawasan Agribisnis Sapi Potong	DPKH	100	100
				Terlaksananya registrasi Kandang Usaha Peternakan	DPKH	100	100
11	Meningkatnya produktifitas ternak	a. Service per conception (S/C) (jumlah pelayanan kawin per kebuntingan)	Peningkatan Populasi Ternak	Bertambahnya Populasi ternak	DPKH	100	100
				Jumlah ternak yang di IB dan PKB	DPKH	100	100
		b. Persentase anak yang lahir dari embrio transfer pada ternak sapi		Terlaksananya :1. Transfer Embrio pada ternak sapi, 2. Tersedianya sapi hasil ET	DPKH	100	100
12	Meningkatnya skala usaha peternak sapi di kawasan	Jumlah peternak yang memiliki sertifikasi farm di Sumatera Barat	Registrasi Kandang Usaha Peternakan	Terlaksananya registrasi Kandang Usaha Peternakan	DPKH	100	100
13	Meningkatnya status kesehatan hewan	a. Tingkat kejadian kasus penyakit brucellosis dan hog cholera	Investigasi dan Tanggap Cepat Pengendalian Avian Influenza (AI) dan Penyakit Hewan Menular (PHM) Lainnya di Sumatera Barat	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan	DPKH	100	100
		b. Persentase pengendalian penyakit hewan menular strategis			DPKH	100	100
14	Meningkatnya uni usaha produk hewan yang memenuhi standar hygiene sanitasi	Persentase unit usaha produk hewan yang memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV), Sertifikat Halal dan ISO	Membina Unit Usaha Pangan Asal Hewan untuk Mendapatkan Sertivikasi NKV	Meningkatnya jumlah unit usaha pangan asal hewan yg memiliki sertifikat NKV	DPKH	100	100
Prioritas 6 : **Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**							
1	Peningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	DPM dan PTSP		
		a. PMA		a.PMA (ribu USD)		100	100
		b. PMDN		b.PMDN (Rp. Juta)		100	100
		Persentase izin penanaman modal		Persentase izin penanaman modal yang direalisasikan	DPM dan PTSP	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Jumlah calon investor yang berminat serius	Meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya di Sumatera Barat	Jumlah Investor	DPM dan PTSP	100	100
		Jumlah minat investasi berdasarkan izin prinsip		Jumlah yang minat investasi	DPM dan PTSP	100	100
3	Meningkanya kualitas pelayanan satu pintu	Persentase penyelsaian masalah penanaman modal	Meningkatnya kualitas pelayanan satu Pintu	Jumlah permaslaahan Investasi yang diselesaikan	DPM dan PTSP	100	100
		Persentase perizinan yang diberikan tepat waktu		Persentase Perizinan yang DIterbitkan Tepat Waktu	DPM dan PTSP	100	100
		Indes Kepuasan Masyarakat (IKM)		IKM (Indek Kepuasan Masyarakat)	DPM dan PTSP	100	100
4	Meningkatnya kinerja perdagangan dalam negeri dan perlindungan konsumen.	Peningkatan omzet pasar rakyat	Meningkatnya kualitas pasar rakyat	Persentase pasar rakyat yang berkondisi baik	Dinas Perindag	100	100
		Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib, label, MKG, distribusi, jasa, sertifikat, registrasi)	Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrologian serta pengawasan barang dan jasa beredar	Persentase barang bertanda SNI, Label dan manual kartu garansi (MKG)mdan lain-lain yang diawasi (%)	Dinas Perindag	100	100
5	Meningkatnya kinerja perdagangan luar negeri.	Nilai ekspor bersih perdagangan	Meningkatnya nilai ekspor non migas daerah	Nilai eksport non migas (juta US$)	Dinas Perindag	100	100
				Jumlah jenis produk nnon migas yang di ekspor (jenis)	Dinas Perindag	100	100
		Jumlah sertifikat mutu produk yang diterbitkan	Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrologian serta pengawasan barang dan jasa beredar	Jumlah sertifikat mutu produk yang diterbitkan (SNI)	Dinas Perindag	100	100
6	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)	Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Dinas Pariwisata	100	100
7	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)	Jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (juta orang)		Persentase Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Dinas Pariwisata	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Meningkatnya kualitas destinasi wisata Sumbar	Jumlah destinasi wisata yang berkem bang	Dinas Pariwisata	100	100
				Jumlah Kerjasama Pembangunan Destinasi Pariwisata Kab/ Kota (Tindak lanjut MOU)	Dinas Pariwisata	100	100
				Terlaksana nya Peduli wisata award	Dinas Pariwisata	100	100
8	Meningkatnya jumlah pengeluaran wisatawan nusantara	Jumlah pengeluaran wisatawan nusantara per kunjungan (Triliun Rp)	Meningkatnya pemberdayaan pelaku usaha pariwisata dan pelaku usaha ekonomi kreatif Meningkat nya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningka tan pemberda yaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK	Dinas Pariwisata	100	100
			Meningkat nya kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningka tan tenaga kerja pariwisata yang memiliki sertifikat profesi	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningka tan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningka tan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensi nya	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : **Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**							
1	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Meningkatnya Pemasaran Hasil perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Meningkatnya Produksi Perikanan laut	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Produksi perairan umum	Meningkatnya produksi perikanan perairan umum	Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
4	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautanan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautanan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	Penurunan Angka Kemiskinan di Sumatera Barat	Angka Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
2	Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan dan bantuan sosial	Terwujudnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkualitas	Jumlah PMKS yang mendapat pelayanan, pendidikan, Bina Keterampilan dan bantuan sosial	Dinas Sosial	100	100
		Jumlah Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha		Jumlah Warga KAT yang mendapat Bimbingan dan Keterampilan Berusaha	Dinas Sosial	100	100
		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terlayani		Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang terlayani	Dinas Sosial	100	100
		Jumlah WRSE yang Bimbingan Teknis dan bantuan Sosial		Jumlah WRSE yang Bimbingan Teknis dan bantuan Sosial	Dinas Sosial	100	100
3	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Jumlah Kab/Kota yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial	Terwujudnya Pemberian bantuan, perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial	Jumlah Kab/Kota yang mendapat jaminan, perlindungan dan bantuan sosial	Dinas Sosial	100	100
4	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	Persentase Tenaga kerja yang berkompeten	Meningkatnya tenaga kerja yang kompeten	Persentase Tenaga kerja yang berkompeten	Disnakertrans	100	100
		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan pemagangan		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan pemagangan	Disnakertrans	100	100
		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan produktivitas		Persentase Tenaga kerja yang berkompeten melalui pelatihan produktivitas	Disnakertrans	100	100
		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi		Persentase Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Terakreditasi	Disnakertrans	100	100
5	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan tenaga kerja sektor formal	Meningkatnya serapan tenaga kerja	Persentase Serapan tenaga kerja sektor formal	Disnakertrans	100	100
		Persentase Serapan tenaga kerja sektor informal		Persentase Serapan tenaga kerja sektor informal	Disnakertrans	100	100
		Persentase Pendidikan BKK di SMK/ perguruan tinggi/ lembaga		Persentase Pendidikan BKK di SMK/ perguruan tinggi/ lembaga	Disnakertrans	100	100
		Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia kerja		Peningkatan sumber daya manusia dalam informasi dunia kerja	Disnakertrans	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Persentase Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat		Persentase Pelayanan BKOL secara cepat, tepat dan akurat	Disnakertrans	100	100
		Persentase Tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai tata cara/mekanisme pengguna tenaga kerja asing		Persentase Tersedianya pengguna tenaga kerja yang menguasai tata cara/mekanisme pengguna tenaga kerja asing	Disnakertrans	100	100
6	Meningkatnya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Jumlah tercapainya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Meningkatnya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Jumlah tercapainya Nagari/Desa Mandiri di Sumatera Barat	Dinas PMD	100	100
Prioritas 9 : **Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**							
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	Dinas PUPR	100	100
2	Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi	Persentase penumpang terangkut transportasi publik a. Darat b. Laut b. Udara c. ASDP d. KA	Peningkatan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan untuk menunjang pelayanan demi kelancaran transportasi	Persentase penumpang terangkut transportasi publik a. Darat b. Laut c. Udara d. SDP e. KA	Dinas Perhubungan	100	100
3	Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselama tan	Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya Mutu Pelayanan Jasa Transportasi, Sarana dan Prasarana Lalu Lintas yang Berkeselamatan	Ratio menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100
4	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	Meningkatnya kinerja layanan irigasi	Persentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	Dinas PSDA	100	100
5	Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Meningkatnya kapasitas konservasi sumber daya air	Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
6	Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Meningkatnya kawasan terlindungi dari daya rusak air	Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
7	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Dinas PUPR	100	100
		Persentase cakupan air minum		Persentase cakupan air minum	Dinas PUPR	100	100
		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi		Persentase Rumah Tangga Bersanitasi	Dinas PUPR	100	100
8	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan	Persentase Rumah Layak Huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
9	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman	Penurunan kawasan kumuh	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	100	100
		Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi		Peningkatan Kualitas Kawasan Strategis dan Khusus Provinsi	OPD Terkait	100	100
10	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100
		Jumlah Infrastruktur EBT - PLTMH - PLTS		Jumlah Infrastruktur EBT - PLTMH - PLTS	Dinas ESDM	100	100
Prioritas 10 : **Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam**							
1	Peningkatan kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Persentase kesesuaian pembangunan dengan tata ruang	Dinas PUPR	100	100
2	Terkendalinya beban pencemaran dan kerusakan Dinas Lingkungan hidup dari usaha/kegiatan	Indeks Kualitas Air (IKA)	Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Meningkatnya kualitas udara Ambien	Persentase meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan hidup	100	
3	Meningkatnya pencegahan dampak lingkungan dan konservasi SDA sesuai daya dukungdan daya tampung lingkungan hidup	Presentase Komisi Penilai AMDAL (KPA) kab/kota yang telah mengimplementasikan Standar Operating Procedure (SOP) sesuai peraturan perundang-undangan	Meningkatnya penataan lingkungan hidup	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkunganr	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang menaati peraturan perundang-undangan Dinas Lingkungan hidup	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase dokumen perencanaan provinsi dan/atau kabupaten/kota yang dilengkapi Kajian Dinas Lingkungan hidup Strategis	Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas Lingkungan hidup	100	100
4	Penurunan dampak lingkungan akibat timbulan sampah dan Limbah B3	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade adipura dan gerakan sumber bersih	Penurunan dampak lingkungan akibat timbulan sampah dan Limbah B3	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade adipura dan gerakan sumber bersih	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase penurunan volume sampah melalui imolementasi 3 R (redice, reuse, recyle)		Persentase penurunan volume sampah melalui imolementasi 3 R (redice, reuse, recyle)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentse peningkatan limbah B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan yang berlaku		Persentse peningkatan limbah B3 yang terkelola sesuai dengan peraturan yang berlaku	Dinas Lingkungan hidup	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
5	Meningkatnya efektifitas penanganan kasus Lingkungan hidup dan penaatan hukum Dinas Lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat	Persentase kasus Lingkungan hidup yang dapat diselesaikan	Meningkatnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	Dinas Lingkungan hidup	100	100
6	Meningkatnya peran serta stakeholder dalam pengelolaan Lingkungan hidup	Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi passing grade Adipura dan Gerakan Sumber Bersih	Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase peningkatan keikutsertaan dalam kegiatan penghargaan lingkungan (Adiwiyata dan Kalpataru)	Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Usaha/Kegiatan peringkat biru PROPER yang mengalokasikan CSR untuk pengelolaan LH	Meningkatnya penilaian terhadap peserta/objek PROPER	Persentse Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Dinas Lingkungan hidup	100	100
		Persentase Bank Sampah yang aktif dari seluruh Bank Sampah yang terdata Tahun 2015	Meningkatnya peran serta masyarakat/lembaga dalam pengelolaan sampah	Persentase lembaga/bank sampah	Dinas Lingkungan hidup	100	100
7	Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam	Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase jumlah kasus illegal yang tertangani	Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)			Dinas Kehutanan	100	100
8	Terwujudnya kepastiandan optimalisasi pemanfaatan serta penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	Persentase unit pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Meningkatnya pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	Dinas Kehutanan	100	100

No	Renstra		Renja		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Terwujudnya Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Optimalisasi PNBP sektor kehutanan	Dinas Kehutanan	100	100
9	Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.kemitraan	Meningkatnya kerjasama dalam perencanaan dan pengelolaan hutan	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat.kemit raan	Dinas Kehutanan	100	100
10	Meningkat nya Kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase penyebarluasan data dan informasi bencana di lokasi rawan bencana	Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase pemahaman tentang bencana	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat tangguh bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kesiapsigaan menghadapi bencana	Persentase pemahaman masyarakat terhadap bencana	BPBD	100	100
11	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	Meningkat nya peralatan dan sistem peringatan dini bencana	Persentase peralatan dan sistem peringatan dini bencana yang siap dan berfungsi	BPBD	100	100
12	Meningkatnya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya penanggapan kejadian bencana	Persentase penanganan tanggap darurat	BPBD	100	100
13	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	BPBD	100	100
14	Meningkatnya tampungan sumber-sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas PSDA	100	100
15	Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Presentase daerah pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas PSDA	100	100
16	Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Meningkatnya tampungan sumber-sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air	Dinas PSDA	100	100
17	Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase luas kawasan konservasi dan rehabilitaso	Meningkatnya penataan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Persentase luas kawasan konservasi dan rehabilitaso	Dinas Perikanan dan Kelauatan	100	100

Perbandingan Indikator Kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja pada tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** Kesesuaian sasaran dan indicator sasaran antara Renstra dengan Renja	100 100	100 100	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja pada tahun 2018 dengan tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indicator sasaran antara Renstra dengan Renja	100 100	100 100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Renstra Bappeda pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2019		Renstra Bappeda	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara Renstra dengan Renja	100 100	100 100	100 100	100 100

c) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD

Sasaran dan indikator sasaran pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 sebagai dokumen tahunan secara substansi telah konsisten dan telah mempedomani serta mengacu pada sasaran dan indikator sasaran yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dimana penjabarannya telah

mempertimbangkan uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12

Kesesuaian sasaran dan indikator RPJMD dengan RKPD

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 1: **Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat**							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakit	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Biro Bintal	100	100
		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dsan sadaqah		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibdah haji		Tingkat Kepuasan terhadap pemberangkkatanda n pemulangan haji	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Sekolah Menengah dengan system boarding school bernuansa islami	Terimplementasikan nya pendidikan berkarakter madani	Terukurnya Integritas Peserta Didik	Dinas Pendidikan	100	100
		Sekolah Menengah yang bernuansa islami	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan pemhaman dan da penagganan nilai-nilai buaya bagi peserta didik	Dians Pendidikan	100	100
		Sekolah menengah yang bernuansa surau	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Sekolah menengah yang bernuansa surau	Dinas Pendidikan	100	100
		Pondok pesantren dengan system boarding school	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan pemhaman dan da penagganan nilai-nilai buaya bagi peserta didik	Dinas Pendidikan	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren dan sekolah agama	Meningkatkan penumbuhan budi pekerti dan pendidikan karakter	Persentase peningkatan kapasitas pengelola manajemen pondok pesantren dan sekolah agama	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam bahaya narkoba	Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Badan Kesbang Pol	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Badan kesbangpol	100	100
		Konflik sosial	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
3	Berkurangnya penyakit masyarakat (Pekat)	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : - Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya angka penyakit masyarakat dan penyalahgunaan narkoba	Persentase penurunan kasus maksiat dan narkoba di Provinsi Sumatera Barat	Dinas satpol PP dan Damkar	100	100
		Angka kriminalitas	Terwujudnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
		Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Berkurangnya penyakit masyarakat	Berkurangnya penyakit masyarakat, dan bahaya penyalah gunaan narkoba	Dispora	100	100
			Meningkatnya penegakan pearturan daerah Provinsi Sumatera Barat	Indeks penegakan peraturan daerah	Dinas Satpol PP	100	100
			Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Provinsi Sumatera Barat	% Kab/Kota yang melaksanakan opearasi gabungan pemberantasan maksiat	Dinas Satpol PP	100	100
		Penanganan	Menurunnya jumlah angka penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan social yang mandiri	Dinas Sosial	100	100
		Rehabilitasi	Menurunnya jumlah angka penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Jumlah wanita Rawansosial ekonomi(WRSE)	Dinas Sosial	100	100
4	Meningkatnya kesalehan sosial Masyarakat dalam penanganan masalah sosial	Persentase pendistribusian zakat, infak dan sedekah	Meningkatnya pemahaman dan pengalaman ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan kesra	100	100
5	Penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	.kompetensi dan kualifikasi pemangku adat 2..Pemanfaatan Tanah ulayat : a.Potensi ekonomi b.Potensi social	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Kompetensi dan kualifikasi pemangku adat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya :MUI, KAN	Meningkatnya peran dan penguatan lembaga agama dan adat dalam tata kehidupan masyarakat	Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya : - MUI - KAN	Biro Bintal	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Penyelesaian kasus/sengketa adat yang diselesaikan oleh KAN	Meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan	Lembaga masyarakat yang aktif : Posyandu KAN, LPM,	Dinas PMD	100	100
6	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Meningkatnya Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya		100	100
		Peningkatan event seni dan budaya		Peningkatan event seni dan budaya		100	100
		Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Meningkatnya Pemberdayaan dan Penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat seni dan budaya	Pelestarian permaainan tradisional anak nagari		100	100
			Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik			
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100
			Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
			Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100
		Rata-rata lamanya PNS mengikuti Diklat (Standar 40 atau 80 PL/orang/ tahun	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	BPSDM	100	100
		Aparatur mengikuti diklat sesuai tupoksi dan persayaratan jabatan	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100
		Perangkat daerah yang sesuai dengan formasi minimal 70%	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
2	Meningkatnya integritas dan kinerja aparatur	Pegawai yang mencapai kinerja baik	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Perangkat Daerah Prov menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)		SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100
3	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggara-an pemerintahan	Opini BPK	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan Daerah	Bakeuda	100	100
				Persentase Meningkatnya Pendapatan Daerah	Bakeuda	100	100
		Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor hasil evaluasi AKIP)		Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Tingkat Kapasitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat	100	100
		Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengawasan Intern Pemerintah		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Inspektorat	100	100
		Penggunaan E-Procurement terhadap pengadaan Barang dan Jasa		Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu	Biro AP2BMD		
		Indeks e-Government Provinsi		Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas		
		Keterbukaan Informasi Publik		Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Humas	100	100
		Instansi Pemerintah yang memilki Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori B keatas)		Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
		Tertib Arsip		Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
4	Meningkatnya sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Keselarasan prioritas pembangunan Provinsi dengan Nasional dan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi daerah		Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Provinsi		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100
		Meningkatnya ketersediaan dan kuaalitas Produk Hukum yang sesuai dengan PeraturanPerundangUndangan		Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
				Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)		Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3: **Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan**							
1	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Pendidikan	100	100
		Harapan lama sekolah		Harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan	100	100
		Rata-rata lama sekolah		Rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan	100	100
2	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Dinas Pendidikan	100	100
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Dinas Pendidikan	100	100
		APM SD/SDLB/Paket A/MI		APM SD/SDLB/Paket A/MI	Dinas Pendidikan	100	100
		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B	Dinas Pendidikan	100	100
		APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C		APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Angka Putus SMA		Angka Putus SMA	Dinas Pendidikan	100	100
		Angka Putus SMK		Angka Putus SMK	Dinas Pendidikan	100	100
4	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Dinas Pendidikan	100	100
		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	Dinas Pendidikan	100	100
5	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Kearsipan	100	100
6	Meningkatanny a fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Balitbang	100	100
Pioritas 4: **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat**							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Dinas Kesehatan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR) per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 tahun	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		ASFR 15-19 tahun		ASFR 15-19 tahun	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk)		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas PPKBK & Pencatatan Sipil	100	100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Klub olah raga	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Persentase peningkatan klub olahraga	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100
4	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Peran pemuda dalam pembangunan (organisasi kepemudaan yang aktif)	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Organisasi kepemudan yang aktif	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
5	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
Prioritas 5 : **Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**							
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	Dinas Pangan	100	100
				Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Dinas Pangan	100	100
		Persentase peningkatan produksi : a. Padi b. Jagung c. Cabe d. Daging e. Telur f. Ikan		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Distanhorbun	100	100
				Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				Persentase Peningkatan Produksi Daging	DPKH	100	100
				Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	DKP	100	100
				Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	DKP	100	100
				Penerapan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	DKP	100	100
2	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi b.	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisnis	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi TPH	Distanhorbun	100	100
				b. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				c. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Peternakan	DPKH	100	100
				d. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perikanan	DKP	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		c. Persentase Peningkatan Kawasan Agribisnis d.		a. Persentase Peningkatan kawasan Agribisnis	Distanhorbun DPKH	100	100
				b. Berkembangnya Kawasan Mina Politan	DKP	100	100
				c. Meningkatnya Daerah Sumber Benih Ikan	DKP	100	100
				d. Meningkatnya Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Perikanan Budidaya	DKP	100	100
				e. Meningkatnya usaha dan Investasi kelautan dan Perinnanan	DKP	100	100
				f. Persentase Kawasan Terintegrasi dalam melaksanakan Optimalisasi Penyuluhan	Distanhorbun DPKH	100	100
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	a. Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	Distanhorbun	100	100
				b. Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan	Distanhorbun	100	100
				c. Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				d. Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan	DKP	100	100
				e. Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	DPKH	100	100
				f. Peningkatan Kelembagaan Peternakan	DPKH	100	100
				g. Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	DKP	100	100
				h. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH	Distanhortbun	100	100
				i. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Distanhortbun	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				j. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP	100	100
				k. Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	Distanhorbun KPKH DKP	100	100
				l. Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan	DKP	100	100
				m. Meningkatnya nilai eksport produk hasil perikanan	DKP	100	100
				n. Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya Hewani	DPKH	100	100
				o. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH	Distanhorbun	100	100
				p. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Distanhorbun	100	100
				q. Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	DPKH	100	100
				r. Meningkatnya sarana dan Prasarana UPTD perikanan Budidaya	DKP	100	100
				s. Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan	DKP	100	100
Prioritas 6 : **Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	PMA	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	DPM dan PTSP	100	100
		PMDN		PMDN (juta)	DPM dan PTSP	100	100
				PMA (US$ (ribu)	DPM dan PTSP	100	100
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (Ratio)	DPM dan PTSP	100	100
				Persentase Perizinan yang Tepat Waktu (%)	DPM dan PTSP	100	100
		Peningkatan Nilai Ekspor	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor (%)	Dinas Perindag	100	100
			Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	Dinas Perindag	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Program Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) (%)	Dinas Perindag	100	100
			Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Dinas Koperasi	100	100
				Persentase Koperasi aktif	Dinas Koperasi	100	100
				Pertumbuhan Jumlah Koperasi	Dinas Koperasi	100	100
			Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi sektor riil	Dinas Koperasi	100	100
				Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
				Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
			Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Peningkatan Kemitraan Usaha UKM	Dinas Koperasi	100	100
				Peningkatan Keunggulan Kompetitif UKM terstandarisasi	Dinas Koperasi	100	100
				Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi	100	100
			Peningkatan Kualitas Produk Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	Disperindag	100	100
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi produk industri	Disperindag	100	100
				Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	Disperindag	100	100
			Pengembangan Kewilayah Industri	Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	Disperindag	100	100
				Peningkatan klaster yang dibina	Disperindag	100	100
2	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	Nusantara	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
		Mancanegara		Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
			Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang berkembang (destinasi)	Dinas Pariwisata	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
			Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100
			Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
				Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : **Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**							
1	Meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta daya saing daerah	Peningkatan Nilai Ekspor	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani(IKU)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan kemaritiman	Persentase Peningkatan produksi perikanan budidaya laut	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan produksi perikanan tangkap	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
			Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
				Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan		100	100
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disnakertrans	100	100
3	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	DPMD	100	100
Prioritas 9 : **Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**							
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Meningkatnya konektifitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase kemantapan jalan provinsi	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya pelayanan perhubungan/transportasi	Persentase peningkatan Penumpang terangkut Modadarat Modalaut, Udara, ASDP, Kereta Api	Meningkatnya pelayanan ‘perhubungan transportasi	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	Dinas Perhubungan	100	100
				Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100
				Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut	Dinas Perhubungan	100	100
				Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat	Dinas Perhubungan	100	100
				Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	Dinas Perhubungan	100	100
3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas	Rasio angka kecelakaan lalu lintas (kematian per 10.000 registrasi kend)	Meningkatnya keselamatan lalu lintas,	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas (Jumlah kematian per 10.000 registrasi kendaraan)	Dinas Perhubungan	100	100
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata Indeks kinerja infrastrukur irigasi provinsi	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan Provinsi	Dinas PSDA	100	100
				Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi (Operasional &Pemeliharaan)	Dinas PSDA		
		Persentase Peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan/peningkatan)	Dinas PSDA	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya rusak air (pembangunan/peningkatan)	Dinas PSDA		
				Terjaganya fungsi luas kawasan yang terdampakdaya rusak air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)	Dinas PSDA		
				Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)	Dinas PSDA	100	100
		Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air		Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan kawasan permukiman dan bangunan lingkungan - air minum - Rumah tangga bersanitasi - Penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase cakupan pelayanan air minum	Dinas PUPR	100	100
				Panjang drainase terbangun	Dinas PSDA	100	100
				Jumlah bangunan strategis terbangun	Dinas PUPR	100	100
				Jumlah rumah Negara terbanguin	Dinas PUPR		
				Jumlah tempat evakuasi sementara terangun	Dinas PUPR		
				Jumlah bangunan gedung pemerintah yang terbangun	Dinas PUPR	100	100
				Meningkatnya rumah ersanitasi	Dinas Perkimtan		
				Penurunan luasan kawasan kumuh			
6	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Rasio elektrifikasi	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100
				Terwujudnya pelaksanaan konservasi energi	Dinas ESDM	100	100
				Meningkatnya persentase IUP yang terkelola secara baik dan benar	Dinas ESDM	100	100
				Persentase peningkatan izin pnggunaan air tanah yang sesuai peraturan yang berlaku	Dinas ESDM	100	100
				Peningkatan kualitas perencanaan energy dan sumber daya mineral	Dinas ESDM	100	100
Prioritas 10 : Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam							
1	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangun an dan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangun an dan tata ruang	PUPR	100	100

No	RPJMD		RKPD		OPD pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Dinas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Dinas Lingkungan hidup	LH	100	100
3	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	LH	100	100
		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani	Meningkatnya penanganan ilegal loging	Persentase jumlah illegal loging yang tertangani	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)	Meningkatnya penurunan jumlah titik panas	Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)	Dinas Kehutanan	100	100
4	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	Meningkatnya kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	BPBD	100	100
5	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana(%)	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana(%)	BPBD	100	100
		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulang an bencana (%)		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulang an bencana (%)	BPBD	100	100
6	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum/ maksimum	Dinas PSDA	100	100
7	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang -	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

Perbandingan Indikator Kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD pada tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	100 100	100 100	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD pada tahun 2018 dan tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indicator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	100 100	100 100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan Renstra Bappeda pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2019		Renstra Bappeda	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RPJMD dengan RKPD	100 100	100 100	100 100	100 100

d) Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS

Dokumen RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi pedoman KUA-PPAS sebagai dokumen

penganggaran. Semua kegiatan yang terdapat dalam KUA-PPAS harus ada dalam RKPD, artinya sasaran dan indikator yang terdapat dalam KUA-PPAS yang mengacu pada sasaran yang terdapat dalam RKPD. Dari anailisa maka terdapat keseuai sasaran dan indikator antara RKPD dan yang terdapat dokumen KUA PPAS Tahun 2019 sebagaimana yang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.16
Kesesuaian sasaran dan indikator RKPD dengan KUA PPAS

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 1: **Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat**							
1	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Zakat yang dikelola badan amil zakat	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah		Peningkatan pengumpulan nilai zakat, infak dan sadaqah	Biro Bintal dan Kesra	100	100
		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji		Penduduk yang mendaftar dan mendapat porsi keberangkatan ibadah haji	Biro Bintal dan Kesra	100	100
2	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama, dan kerukunan antar umat beragama	Konflik dalam kelompok masyarakat bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA)	Badan Kesbangpol	100	100
		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama		Koordinasi antar pemuka dan tokoh umat beragama	Badan KesbangPol	100	100
3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Konflik sosial	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Badan Kesbangpol	100	100
4	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Menurunnya kasus penyakit masyarakat	Kasus perbuatan maksiat : Narkoba : Kasus Pidana Narkoba	Badan Kesbangpol	100	100
		Angka kriminalitas		Angka kriminalitas	Badan Kesbangpol	100	100
5	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam bahaya narkoba	Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Meningkatnya peran serta kepemudaan dalam bahaya narkoba	Pemuda (16-30 tahun) bebas narkoba	Dispora	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
6	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba		Meningkatnya pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Dinas Satpol PP	100	100
7	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar	Kesbangpol	100	100
8	Meningkatnya pengembangan lembaga-lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	Lembaga adat dan agama yang melaksanakan peran dan fungsinya :MUI , KAN	Meningkatnya pengembangan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan	Lembaga adat dan agama yang melaksana-kan peran dan fungsi-nya :MUI, KAN	Biro Bintal dan Kesra	100	100
9	Meningkatnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Meningkatnya Penerapan nilai-nilai adat dan budaya dalam masyarakat	Peningkatan Sanggar seni dan Budaya	Dinas Kebudayaa n	100	100
		Peningkatan event seni dan budaya		Peningkatan event seni dan budaya	Dinas Kebudayaa n	100	100
10	Meningkatnya Pemberdayaan dan Penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat seni dan budaya	Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Meningkatnya Pemberdayaan dan Penguatan eksistensi lembaga-lembaga adat seni dan budaya	Pelestarian permaainan tradisional anak nagari	Dinas Kebudayaa n	100	100
11	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik	Meningkatnya Pembinaan dan pengembangan pendidikan budaya	Peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik	Dinas Kebudayaa n	100	100
Prioritas 2: **Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan**							
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BPSDM	100	100
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan	BPSDM	100	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	BKD	100	100
3	Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Meningkatnya kualitas data dan informasi kepegawaian	Persentase layanan administrasi kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	BKD	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kediklatan	Persentase ASN Provinsi Sumbar yang telah mengikuti pelatihan minimal 20 JP/Tahun	BPSDM	100	100
5	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan dan mutu pengembangan kompetensi aparatur	Indeks Kepuasan Masyarakat	BPSDM	100	100
6	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	Meningkatnya kapasitas dan manajemen aparatur	Persentase SKPD dengan jumlah pegawai yang tersedia sesuai formasi minimal 70%	BKD	100	100
7	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Meningkatnya pembangunan zona integritas pada SKPD Provinsi Sumatera Barat	Persentase SKPD yang bebas dari penyimpangan aset	Inspektorat	100	100
		SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM		SKPD yang telah dikembangkan menjadi zona integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat	100	100
8	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Bakeuda	100	100
		Meningkatnya Pendapatan Daerah		Meningkatnya Pendapatan Daerah	Bakeuda	100	100
		Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas		Hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) Provinsi Sumatera Barat	Inspektorat	100	100
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Interen Pemerintah	Inspektorat	100	100
		Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu		Persentase penyelesaian proses pengadaan barang dan jasa tepat waktu	Biro AP2BMD	100	100
		Indeks e-Government Provinsi		Indeks e-Government Provinsi	Biro Humas	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas		Indeks Keterbukaan Informasi Publik produktifitas	Biro Humas	100	100
		Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas		Hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai B keatas	Biro Organisasi	100	100
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD	Biro Pemerintahan	100	100
		Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan		Jumlah Penyelenggara Kearsipan yang Menyelenggarakan Kearsipan sesuai Prosedur yang Ditetapkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	100	100
		Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan		Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan	Bappeda	100	100
		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Bappeda	100	100
		Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum		Jumlah produk hukum daerah provinsi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
		Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum		Jumlah produk hukum daerah kabupaten dan kota yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum	Biro Hukum	100	100
		Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan		Persentase UKPP Provinsi dan Kab/Kota yang menyusun dan Menerapkan Standar Pelayanan	Biro Organisasi	100	100
Prioritas 3: **Meningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan**							
1	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya tingkat pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas pendidikan	100	100
		Harapan lama sekolah		Harapan lama sekolah	Dinas pendidikan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Rata-rata lama sekolah		Rata-rata lama sekolah	Dinas pendidikan	100	100
2	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Meningkatnya integritas peserta didik	Indeks Integritas siswa	Dinas pendidikan	100	100
3	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan	APK PAUD	Dinas pendidikan	100	100
		APM SD/SDLB/Paket A/MI		APM SD/SDLB/Paket A/MI	Dinas pendidikan	100	100
		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B		APM SMP/ /MTs/ SMPLB/ Paket B	Dinas pendidikan	100	100
		APM SMA/SMK/MA / SMALB/ Paket C		APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	Dinas pendidikan	100	100
		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah		Angka Tidak Melanjutkan dari SMP ke Sekolah Menengah	Dinas pendidikan	100	100
		Angka Putus SMA		Angka Putus SMA	Dinas pendidikan	100	100
		Angka Putus SMK		Angka Putus SMK	Dinas pendidikan	100	100
4	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja	Lulusan Sekolah Menengah yang diterima di Perguruan Tinggi	Dinas pendidikan	100	100
		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)		Lulusan SMK yang diterima di dunia usaha dan industri (DUDI)	Dinas pendidikan	100	100
5	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Meningkatnya minat baca dan budaya membaca	Kenaikan Kunjungan perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	100
6	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Meningkatannya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	Balitbang	100	100
Prioritas 4: Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat							
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Persentase kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional/ KIS	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat secara merata	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan	Dinas Kesehatan	100	100
2	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya kualitas kependudukan, pembangunan keluarga dan keluarga berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)		CPR (Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)		Unmet need (Kebutuhan Ber KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		ASFR 15-19 tahun		ASFR 15-19 tahun	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)		Kehamilan yang tidak diinginkan dari WUS (15-49 tahun)	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk		LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	100
3	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Persentase peningkatan klub olahraga	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berolah raga	Persentase peningkatan klub olahraga	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100
4	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Organisasi kepemudan yang aktif	Meningkatnya kapasitas pemuda dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan	Organisasi kepemudan yang aktif	Dins Pemuda dan Olahraga	100	100
5	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya pembangunan gender dan pemberdayaan gender serta pemenuhan hak anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)		Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100
Prioritas 5 : **Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis**							
1	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat	Dinas Pangan	100	100
		Ketersediaan Pangan Utama (beras)		Ketersediaan Pangan Utama (beras)	Dinas Pangan	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan		Persentase Peningkatan Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Daging		Persentase Peningkatan Produksi Daging	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	100	100
		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Penerapan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan		Penerapan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
2	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisni	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi TPH	Meningkatnya usaha pertanian dengan sistem agribisni	a. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi TPH	Distanhorbun	100	100
		b. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan		b. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		c. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Peternakan		c. Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Peternakan	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	100	100
		d.Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perikanan		d.Persentase Peningkatan Kawasan Sentra Produksi Perikanan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Persentase Peningkatan kawasan Agribisnis		Persentase Peningkatan kawasan Agribisnis	Distanhorbun DPKH DKP	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Berkembangnya Kawasan Mina Politan		Berkembangnya Kawasan Mina Politan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya Daerah Sumber Benih Ikan		Meningkatnya Daerah Sumber Benih Ikan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Perikanan Budidaya		Meningkatnya Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi Perikanan Budidaya	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Meningkatnya usaha dan Investasi kelautan dan Perinnanan		Meningkatnya usaha dan Investasi kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan & Kelautan	100	100
		Persentase Kawasan Terintegrasi dalam melaksanakan Optimalisasi Penyuluhan		Persentase Kawasan Terintegrasi dalam melaksanakan Optimalisasi Penyuluhan	Distanhorbun DPKH	100	100
3	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha TPH	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Penyuluhan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan		Persentase Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan		Meningkatnya kapasitas kelompok dan kelembagaan perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan		Peningkatan SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Peternakan	DPKH	100	100
		Peningkatan Kelembagaan Peternakan		Peningkatan Kelembagaan Peternakan	DPKH	100	100
		Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan		Meningkatnya SDM Aparatur dan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil TPH	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Distanhorbun	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran		Persentase Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran	Distanhorbun	100	100
		Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan		Meningkatnya Produksi olahan hasil perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Meningkatnya nilai eksport produk hasil perikanan		Meningkatnya nilai eksport produk hasil perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya Hewani		Meningkatnya Pengamanan Sumberdaya Hewani	DPKH	100	100
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana TPH	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	Distanhorbun	100	100
		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan		Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	DPKH	100	100
		Meningkatnya sarana dan Prasarana UPTD perikanan Budidaya		Meningkatnya sarana dan Prasarana UPTD perikanan Budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan		Meningkatnya sarana penggunaan alsintan dan sarana prasarana kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 6 : **Pengembangan Dinas Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi.**							
1	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investas	Realisasi Investasi	DPM dan PTSP	100	100
		PMDN (juta)		PMDN (juta)	DPM dan PTSP	100	100
		PMA (US$ (ribu)		PMA (US$ (ribu)	DPM dan PTSP	100	100
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	ndeks Kepuasan Masyarakat (Ratio)	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu	ndeks Kepuasan Masyarakat (Ratio)	DPM dan PTSP	100	100
		Persentase Perizinan yang Tepat Waktu (%)		Persentase Perizinan yang Tepat Waktu (%)	DPM dan PTSP	100	100
3	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor (%)	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Peningkatan Nilai Ekspor (%)	Dinas Perindag	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Peningkatan omzet pasar rakyat (%)	Dinas Perindag	100	100
5	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) (%)	Peningkatan Perlindungan Konsumen	Persentase produk dan jasa yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan (SNI wajib) (%)	Dinas Perindag	100	100
6	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Pertumbuhan koperasi berkualitas	Dinas Koperasi	100	100
		Persentase Koperasi aktif		Persentase Koperasi aktif	Dinas Koperasi	100	100
		Pertumbuhan Jumlah Koperasi		Pertumbuhan Jumlah Koperasi	Dinas Koperasi	100	100
7	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi sektor riil	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing Koperasi	Pertumbuhan volume usaha Koperasi sektor riil	Dinas Koperasi	100	100
		Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi		Pertumbuhan volume usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
		Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi		Pertumbuhan permodalan usaha simpan pinjam koperasi	Dinas Koperasi	100	100
8	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Peningkatan Kemitraan Usaha UKM	Peningkatan dan Pengembangan Daya Saing UMKM	Peningkatan Kemitraan Usaha UKM	Dinas Koperasi	100	100
		Peningkatan Keunggulan Kompetitif UKM terstandarisasi		Peningkatan Keunggulan Kompetitif UKM terstandarisasi	Dinas Koperasi	100	100
		Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah		Peningkatan Usaha Kecil Menjadi Usaha Menengah	Dinas Koperasi	100	100
9	Peningkatan Kualitas Produk Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	Peningkatan Kualitas Produk Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi dan peningkatan kualitas kemasan produk industri	Dinas Perindag	100	100
10	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi produk industri	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi, standarisasi produk industri	Dinas Koperasi	100	100
		Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan		Jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan	Dinas Koperasi	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
11	Pengembangan Kewilayah Industri	Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	Pengembangan Kewilayah Industri	Peningkatan sentra industri unggulan yang dibina	Dinas Perindag	100	100
		Peningkatan klaster yang dibina		Peningkatan klaster yang dibina	Dinas Perindag	100	100
12	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
		Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		Peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara (%)	Dinas Pariwisata	100	100
13	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang berkembang (destinasi)	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Pariwisata	Jumlah destinasi wisata yang berkembang (destinasi)	Dinas Pariwisata	100	100
14	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya (orang)	Pengembangan Kelembagaan, SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan SDM ekraf berbasis Seni dan Budaya yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100
		Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya (orang)		Peningkatan SDM ekraf berbasis Media, Desain dan Ipek yang meningkat kompetensinya (orang)	Dinas Pariwisata	100	100
15	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (pelaku)	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
		Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK (pelaku)		Peningkatan pemberdayaan (omset/modal/tenaga kerja) pelaku ekonomi kreatif berbasis media, desain dan IPTEK (pelaku)	Dinas Pariwisata	100	100
Prioritas 7 : **Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan**							
1	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Perikanan dan konsumsi ikan	Ekspor Hasil Perikanan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
2	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
3	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Meningkatnya Produksi Perikanan	Produksi perikanan laut	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
		Produksi perairan umum		Produksi perairan umum	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
4	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Berkurangnya kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan	Persentase kapal nelayan yang tidak melakukan illegal fishing	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
5	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Meningkatnya penataan dan pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Luas kawasan konservasi dan Rehabilitasi	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
		Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan		Meningkatnya pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan	Dinas Kelautan & Perikanan	100	100
Prioritas 8 : **Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal**							
1	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	Menurunnya jumlah penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	DPMD	100	100
2	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	Disnakertrans	100	100
3	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	Menuntaskan penanganan daerah tertinggal	Kabupaten Tertinggal	DPMD	100	100
Prioritas 9 : **Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur**							
1	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Meningkatnya Kualitas Jalan Provinsi	Kemantapan jalan provinsi	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	Meningkatnya pelayanan perhubungan/ transportasi	Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda kereta api	Dinas Perhubungan	100	100
		Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut		Peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda laut	Dinas Perhubungan	100	100
		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum moda darat	Dinas Perhubungan	100	100
		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda		Persentase peningkatan jumlah penumpang angkutan umum seluruh moda	Dinas Perhubungan	100	100
3	Meningkatnya keselamatan lalu lintas,	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Meningkatnya keselamatan lalu lintas,	Persentase penurunan rasio angka kecelakaan lalu lintas	Dinas Perhubungan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
4	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan Provinsi	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumberdaya air	Rata-rata indeks kinerja infrastruktur irigasi kewenangan provinsi	Dinas PSDA	100	100
		Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi (Operasional &Pemeliharaan)		Terjaganya indeks kinerja infrastruktur irigasi Provinsi (Operasional &Pemeliharaan)	Dinas PSDA	100	100
		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan /peningkatan)		Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber-sumber air (pembangunan/peningkatan)	Dinas PSDA	100	100
		Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)		Terjaganya fungsi dan kapasitas tampung sumber air (Operasional/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi)	Dinas PSDA	100	100
		Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya rusak air (pembangunan/ peningkatan)		Persentase pengurangan luasan kawasan yang terdampak daya rusak air (pembangunan/ peningkatan)	Dinas PSDA	100	100
		Terjaganya fungsi luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Operasional/Pemeliharaan/Rehabilitasi)		Terjaganya fungsi luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air (Operasional/Pemeliharaan/ Rehabilitasi)	Dinas PSDA	100	100
5	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase rumah tangga bersanitasi	Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung	Persentase rumah tangga bersanitasi	Dinas PUPR	100	100
		Persentase cakupan pelayanan air minum		Persentase cakupan pelayanan air minum	Dinas PUPR	100	100
		Penurunan luasan kawasan kumuh		Penurunan luasan kawasan kumuh	Dinas Perkimtan	100	100
6	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Meningkatnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT)	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Dinas ESDM	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
Prioritas 10 : Pelestarian Dinas Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam							
1	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Meningkatnya kesesuaian rencaaa pembangunan dan tata ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dan tata ruang	Dinas PUPR	100	100
2	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas Lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan hidup	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya kualitas udara Ambien	Persentase meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya penataan lingkungan hidup	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya kinerja layanan infrastruktur irigasi	Indeks kinerja infrastruktur irigasi provinsi	Dinas LH	100	100
			Berkurangya dampak daya rusak air	Persentase pengurangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders	Persentase peningkatan jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan	Dinas LH	100	100
			Meningkat nya penanganan tanggap darurat bencana	Presentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya penilaian terhadap peserta/objek PROPER	Persentse Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah)	Dinas LH	100	100
			Meningkatnya peran serta masyarakat/ lembaga dalam pengelolaan sampah	Persentase lembaga /bank sampah	Dinas LH	100	100
3	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Terpeliharanya fungsi ekosistem dan kualitas lahan	Persentase Penurunan lahan kritis	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani		Persentase jumlah illegal loging yang tertangani	Dinas Kehutanan	100	100
		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)		Persentase penurunan jumlah titik panas (hospot)	Dinas Kehutanan	100	100
			Terwujudnya kepastian dan optimalisasi pemanfaatan serta pengunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsinya	Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fingsinya	Dinas Kehutanan	100	100

No	RKPD		KUA PPAS		OPD Pelaksana	Tingkat kesesuaian sasaran	
	Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator		Sasaran	Indikator
				Pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu	Dinas Kehutanan	100	100
				Persenstase peningkatan PNPB	Dinas Kehutanan	100	100
4	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	Berkurangnya resiko bencana	Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana (%)	BPBD	100	100
		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana		Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana	BPBD	100	100
5	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana (%)	Meningkatnya sistem peringatan dini bencana	Persentase peningkatan sistem peringatan dini bencana	BPBD	100	100
		Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulang an bencana (%)	Meningkatnya penanganan tanggap darurat dan pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase Daerah Pasca bencana yang bisa dipulihkan sesuai standar kapasitas penanggulang an bencana (%)	BPBD	100	100
			Meningkatnya pemulihan wilayah/daerah pasca bencana	Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana(%)	BPBD	100	100
6	Terpeliharanya debit sungai	Rasio debit minimum	Meningkatnya tampungan sumbet -sumber air	Persentase peningkatan kapasitas tampungan sumber- sumber air	Dinas PSDA	100	100
			Meningkatnya kinerja infrastruktur irigasi	Indek kinerja infrastruktur irigasi	Dinas PSDA	100	100
			Berkurangnya dampak daya rusak air	Persentase pengutangan luas kawasan yang terdampak daya rusak air	Dinas PSDA	100	100
7	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Meningkatnya kualitas ekosistem pesisir dan laut	Persentase luas tutupan dalam kondisi baik - Mangrove - Terumbu karang	Kelautan Perikanan	100	100

Hasil analisis capaian terhadap Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan yang meliputi kesesuaian antar dokumen RPJMD dengan Renstra OPD, Renstra OPD dan Renja OPD, RPJMD dengan RKPD, RKPD dengan KUA/PPAS, diperoleh nilai sebesar 100 %. Kondisi ini mengambarkan bahwa dokumen rencana lima tahunan RPJMD telah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana lima tahunan OPD dan rencana tahunan daerah.

Perbandingan Indikator Kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS pada tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	**Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan** - Kesesuaian sasaran dan indicator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	100 100	100 100	100 100

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja untuk sasaran strategis perencanaan pembangunan yang berkualitas pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS pada tahun 2018 dengan tahun 2019 antara target dan realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indicator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	100 100	100 100

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 pada sub indikator kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS pada tahun 2019 dengan Renstra Bappeda dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Renstra

No.	Indikator kinerja	Realisasi 2019		Renstra Bappeda	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
	Persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan - Kesesuaian sasaran dan indikator sasaran antara RKPD dengan KUA PPAS	100 100	100 100	100 100	100 100

☑ **Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional**

Secara resmi tidak ada standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, karena memnag seharusnya konsistensi antar dokumen perencanaan mencapai 100%. Sasaran, indikator kinerja dan program yang terdapat pada RPJMD, harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya.

Konsistensi penyusunan dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda Provinsi Sumatera Barat dengan indikator persentase kesesuaian antar dokumen perencanaan sudah mencapai realisasi 100 %.

☑ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Terdapatnya konsistensi sasaran indikator kinerja antar dokumen yang ditetapkan telah sesuai dengan yang kita targetkan sehingga dokumen perencanaan sudah dapat dikatakan berkualitas. Konsistensi tersebut dapat terwujud karena adanya kepatuhan dan komitmen semua OPD yang terlibat. Sebagaimana komitmen dalam melaksanakan *e-planning* untuk proses penyusunan perencanaan yang sudah menjadi keharusan serta sudah diintegrasikan antara perencanaan dan penganggaran sehingga kosistensi tetap terjaga.

Disamping itu dalam rapat pembahasan perencanaan mulai dari pembahasan renja, forum SKPD dan musrenbang, konsistensi tetap dikawal oleh masing-masing oleh Bappeda melalui bidang terkait. Begitu juga pada proses penganggaran, mulai dari pembahasan RKA sampai pembahasan DPA konsistensi dokumen yang telah ditetapkan akan menjadi acuan dalam pembahasan dimaksud.

☑ **Analisis Pencapaian Kinerja**

Analisis pencapaian kinerja adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan bagaimana pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Analisis ini dibagi dua yaitu analisis penggunaan sumberdaya dan analisis program /kegiatan penunjang pencapaian kinerja.

a. Analisis efesiensi penggunaan sumberdaya

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Tahun 2019 dengan menggunakan aplikasi elektronik (*e-planning*), Bappeda Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pengembangan dan pembaharuan terhadap aplikasi ini. Dengan demikan didapat efisiensi penggunaan sumber daya, seperti sumber daya manusia, waktu, dan

juga mencapai ketepatan, efisiensi dan efektifitas penyusunan rencana karena sudah berbasis sistem informasi teknologi.

Disamping itu untuk sebagai media publikasi elektronik, Bappeda Provinsi Sumatera Barat menyediakan situs web yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan efiensi penggunaan sumberdaya terutama bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dalam dokumen perencanaan.

b. Analisis Program /kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja

Untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian target kinerja sesuai target yaitu konsistensi dan kesesuaian antar dokumen dilakukan upaya antara lain :

1. Menyediakan anggaran yang menunjang pencapaian target kinerja yaitu melalui rapat-rapat koordinasi secara berkala baik dengan kabupaten kota maupun lingkup OPD provinsi dan dengan kementerian terkait.
2. Menyempurnakan aplikasi e-Planning untuk menjaga konsistensi perencanaan sampai kepada pengaanggaran. Disamping itu menetapkan SK operator aplikasi Simlaras untuk memproses usulan DAK sebagai upaya mewujudkan konsistensi dokumen perencanaan dari pusat sampai daerah.

Sasaran Strategis 2	**Meningkatkan tata kelola organisasi**

Tata kelola organisasi yang baik diperlukan dalam rangka mendukung dan menentukan keberhasilan jalannya organisasi, baik pengelolaan secara internal maupun secara ekternal. Untuk melihat keberhasilan tata kelola organisasi tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dari organisasi dimaksud adalah Meningkatkan tata kelola organisasi. Indikator yang digunakan dalam mengukur meningkatnya tata Kelola Organisasi adalah 1): Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan 2) Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan capaian dengan target indikator kinerja Nilai Sakip BB dan capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu dan target capaian keuangan adalah 95 %. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap kepala SKPD diwajibkan menyusun Laporan Kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Untuk mewujudkan capaian kinerja nilai SAKIP BB, Bappeda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai langkah dengan berupaya setiap program dan kegiatan yang dilakukan mengacu kepada sasaran program kepada pencapaian sasaran strategis organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran setelah kegiatan dilaksanakan dengan menyusun laporan kinerja tahun 2020.

☑ **Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019**

Capaian indikator kinerja sasasaran strategis 2 (meningkatkan tata kelola organisasi yang baik dan bersih) diukur dengan dua indakator :

a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

   Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja merupakan dokumen laporan evaluasi akuntabilitas kinerja Bapppeda tahun 2018 yang keluar pada tahun 2019. Dokumen ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung tujuan organisasi. Nilai ini dievaluasi oleh inspektorat dengan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu

   Diukur dengan membandingkan realisasi keuangan pada tahun 2019 terhadap anggaran kas yang ditetapkan perbulan pada masing-masing program dan kegiatan, serta realisasi keuangan sampai dengan akhir tahun 2019.

   Pencapaian sasaran strategis 2 di tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.20
Pencapaian Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Yang Baik dan bersih			
Indikator Kinerja	**Target**	**Realisasi**	**Capaian %**
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	100
Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu.	95	96.30	101.36

Dari tabel tersebut diatas pencapaian target indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja capaiannya adalah 100% dari target yang ditetapkan adalah BB realisasinya juga BB namun secara angka terdapat penurunan dari BB dengan nilai 73.75 capaian tahun 2017 menjadi BB dengan nilai 71.72 capaian tahun 2018.

Selanjutnya target realisasi keuangan pengelolaan Program dan Kegiatan Bappeda tahun 2019 yaitu 95%, capaian realisasi sebesar 96.30%. Selanjutnya untuk melihat pencapaian target realisasi keuangan perbulan berdasarkan anggaran kas, maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.21

PERSENTASE CAPAIAN REALISASI KEUANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN ANGGARAN KAS TAHUN 2019

NO	BULAN	ANGGARAN KAS	REALISASI	PERSENTASE
1	JANUARI	1.341.182.449	-	0
2	FEBRUARI	4.074.487.819	461.880.469	11,34
3	MARET	6.699.707.077	1.678.008.468	25,05
4	APRIL	9.289.244.784	2.671.078.426	28,75
5	MEI	10.214.043.633	4.939.145.743	48,36
6	JUNI	11.019.764.145	5.375.882.662	48,78
7	JULI	12.173.146.958	6.929.918.630	56,93
8	AGUSTUS	12.737.612.125	8.589.983.261	67,44
9	SEPTEMBER	12.937.069.020	10.184.917.939	78,73
10	OKTOBER	14.214.352.414	12.700.802.576	89,35
11	NOVEMBER	17.698.747.769	14.636.330.720	82,70
12	DESEMBER	17.626.866.315	16.973.987.941	96,30

Kondisi tersebut mencerminkan belum konsistennya pencapaian realisasi keuangan pengelolaan Program dan Kegiatan Tahun 2019. Untuk mencapai target realisasi keuangan pengelolaan program dan kegiatan yang konsisten dan tepat waktu maka penyusunan anggaran kas perlu disesuaikan dengan jadwal/tahapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang direncanakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) masing-masing Program dan Kegiatan.

☑ Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini:

Tabel 3.22

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dan Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai SAKIP	BB	BB (73.75)	100	BB	BB (71.72)	100
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu.	94	91,06	96,87	95	96,30	101.36

Ket : Nilai SAKIP BB (73.75) adalah penilaian untuk tahun 2017
Nilai SAKIP BB (71.72) adalah penilaian untuk tahun 2018

☑ Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Pada Dokumen Renstra Bappeda 2016-2021

Pada Perubahan Rencana Strategis Bappeda tahun 2016-2021 Sasaran Bappeda adalah meningkatnya tata kelola organisasi dengan dua indikator kinerja sasaran yaitu nilai sakip, dan persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu. Untuk membandingkan dengan realisasi kinerja tahun 2019 dengan target yang terdapat dalam dokumen renstra tergambar pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.23
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja yang terdapat dalam Renstra

No	Indikator Kinerja	2019		
		Target Dalam Renstra	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai SAKIP	BB	BB (71,72)	100
2	Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu.	95	96,30	101.36

Dari tabel tersebut dapat dilihat Kondisi ini menggambarkan bahwa target yang ditetapkan dalam Renstra terhadap nilai SAKIP dapat mencapai 100% artinya sesuai dengan target. Sedangkan indikator Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu target dalam renstra 95% realisasi 96,30% dengan capaian 101.36. Maka dapat dikatakan bahwa untuk capaian sasran ke dua ini Bappeda mendapat prediket Amat Baik dengan rata rata capaian 100.68%.

☑ **Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Dari berbagai penelusuran yang telah dilakukan, belum ada standar nasional yang dapat dipedomani mengenai sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Organisasi dengan indikator kinerja Nilai Sakip dan Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu. Namun untuk nilai Sakip merupakan ukuran yang ditetapkan sebagai indiktor menentukan untuk melihat keberhasilan kinerja organisasi atau Pemerintah Pusat maupun Daerah. Nilai yang paling tinggi tersebut adalah secara Nasional AA. Sedangkan untuk indikator lainnya secara nasional belum ada standarnya, namun apabila nilai tersebut makin tinggi maka itulah nilai kinerja yang paling baik.

☑ **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan**

Perencanaan yang baik adalah dokumen perencanaan yang konsisten antar dokumen melalui proses partisipatif dan akuntabel serta aplikatif. Agar dokumen perencanaan tersebut berkualitas, partisipatif dan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan salah satunya didukung oleh tata kelola organisasi/kelembagaan yang baik. Keberadaaan suatu organisasi yang baik dan bersih diharap akan dapat meningkatkan kinerja aparatur dan lembaga dalam melaksanakanan tugas dan fungsi organisasi. Dengan pengelolaan organisasi yang baik berupa pelaksanaan anggaran yang tepat maka akan dapat menciptakan efisisiensi anggaran tanpa mengurangi substansi tupoksi OPD. Beberapa hal penyebab keberhasilan adalah :

1. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan representatif seperti gedung dengan ruangan kerja yang baik, ruangan rapat yang cukup tersedia, sarana kerja seperti meja kursi, komputer PC dan laptop yang cukup dan memadai serta kendaraan dinas yang siap operasional.

2. Anggaran yang cukup tersedia sehingga dapat mendukung tugas rutin dan tugas dalam rangka mencapai target kinerja. Selanjutnya juga didukung oleh kualitas dan kuantitas ASN yang cukup memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.

3. Layanan dari petugas untuk setiap tamu atau pengunjung yang akan berurusan dengan Bappeda, sehingga memudahkan pengunjung untuk mendapatkan informasi.

Namun demikian dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari masih dirasakan permasalahan yang dihadapi organisasi baik dari segi pengelolaan anggaran, pelayanan maupun dalam pencapaian target sasaran kinerja organisasi. Permasalahan yang dihadapi organisasi adalah :

1. Pelaksanaan Pekerjaan yang mendahului penyedian anggaran kas, sehingga pembayaran dilakukan setelah dilakukan pergeseran hal ini disebabkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan karena menyesuaikan dengan agenda nasional sehingga harus dilakuan lebih awal.

2. Terdapat kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam TOR seperti kegiatan Rakorgub se Sumatera yang semestinya dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD se Sumatera namun tidak hadir sehingga alokasi anggaran yang telah disediakan banyak yang tidak dapat direalisasikan.

3. Pelayanan terhadap kunjungan yang akan berurusan dengan Bappeda masih belum optimal disebabkan pintu masuk ke ruang belum satu pintu sehingga pengunjung sulit untuk di arahkan dan terlayani dengan baik. Selanjutnya belum adasatu ruangan khusus untuk setiap pengunjung akan berkonsultasi ataupun berururusan dengan Bappeda. Dengan adanya ruangan tertentu nantinya akan lebih memberikan pelayanan yang mememadai.

☑ **Analisis Pencapaian Kinerja**

Analisis pencapaian kinerja adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Analisis pencapaian kinerja dapat dibagi dua yaitu analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dan analisis program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam upaya untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan yang baik dan tepat waktu maka diperlukan sumberdaya manusia yang cukup dan memadai sesuai dengan peranaannya masing-masing, namun tenaga yang tersedia

masih relatif kurang untuk pengelola terutama di bagian keuangan dan bidang-bidang sebagai pembantu pengelolaan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menfungsikan tenaga adminitrasi lainnya yang ditugasi untuk mengelola keuangan. Untuk meningkatkan kapasitas tenaga pengelola keuangan dilakukan dengan mengirim aparatur untuk mengikuti diklat yang dibiayai oleh instansi lain, dengan demikian dapat lebih efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Khusus pelayanan tamu dan pengunjung dilakukan oleh tenaga pihak ketiga yang diberikan khusus untuk melayani pengunjung yang akan berkonsultasi ataupun berurusan dengan Bappeda. Dengan demikian diharapkan aparatur Bappeda lebih fokus untuk melaksanakan pekerjaannnya.

b. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mencapai keberhasilan target kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan yang baik dan bersih dilakukan melalui beberapa upaya yaitu :

1. Menganggarkan untuk peyediaan sarana dan prasarana pendukung kerja seperti Komputer PC dan Laptop, penyediaan sarana ruangan rapat dan prasarana pelayanan dan peningkatan kapasitas pengelola keuangan.

2. Mengirimkan peserta untuk Diklat Perencana maupun diklat keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga lainnya seperti Bappenas, Kemendagri Unand maupun lembaga lainnya.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi tugas Bappeda untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis, memerlukan dukungan Anggaran melalui Belanja Langsung yang memadai. Pada tahun 2019, Bappeda mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 17.626.886.315,- yang direalisasikan sebesar Rp. 16.973.987.941,- atau sebesar 96,30%.

Tabel 3.24
Anggaran dan realisasi belanja per sasaran strategis
APBD tahun 2019

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Perencanaan pembangunan yang berkualitas	8.512.819.307	7.967.703.007	93,60
2.	Peningkatan tata kelola organisasi yang baik dan bersih	9.114.067.008	9.006.286.834	98,82
	Jumlah	17.626.886.315	16.973.989.841	96,30

Realisasi anggaran per program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25
Anggaran dan Realisasi Belanja per Program/Kegiatan tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI KEUANGAN	
			Rp.	%
	BELANJA LANGSUNG	**17.626.886.315**	**16.973.989.841**	**96,30**
1	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**6.063.798.308**	**6.030.647.340**	**99,45**
1	Penyediaan jasa surat menyurat	39.420.000	39.420.000	100,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik	879.600.000	873.910.749	99,35
3	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	842.347.000	834.188.630	99,03
4	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	328.450.000	326.195.050	99,31
5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	71.389.000	68.099.013	95,39
6	Penyediaan alat tulis kantor	75.238.310	72.855.677	96,83
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	90.000.000	88.338.828	98,15
8	Penyediaan komponen instalasi listrik	44.490.276	42.990.849	96,63
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	44.702.100	40.729.050	91,11
10	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	3.585.161.622	3.583.271.528	99,95
11	Penyediaan jasa pembinaan fisik dan mental	16.000.000	13.750.000	85,94
12	Penyediaan makanan dan minuman	47.000.000	46.898.000	99,78
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**2.036.182.933**	**1.984.802.303**	**97,48**
1	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio, alat komunikasi dan alat informasi	26.750.000	25.978.500	97,12
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	300.409.000	283.903.500	94,51

3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	131.465.000	126.562.303	96,27
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor	47.200.000	45.650.000	96,72
5	Pemeliharaan rutin/berkala computer dan jaringan komputerisasi	72.344.900	69.093.000	95,51
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	258.014.033	256.615.000	99,46
7	Pengadaan kendaraan dinas/opersional	1.200.000.000	1.177.000.000	98,08
3	**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**71.250.000**	**71.250.000**	**100**
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	71.250.000	71.250.000	100
4	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**184.624.800**	**167.350.300**	**90,64**
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	184.624.800	167.350.300	90,64
5	**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**758.210.967**	**752.236.857**	**99,21**
1	Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD	52.059.300	50.900.165	97,77
2	Penatausahaan keuangan SKPD	326.479.000	324.868.42	99,51
3	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	253.184.000	252.565.420	99,76
	Pengelolaan Pengawasan dan pengendalian asset SKPD	126.488.667	123.902.800	97,96
6	**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN**	**435.920.000**	**422.508.855**	**96,92**
1	Pengelolaan webasite www.bappeda.sumbarprov.go.id	76.864.000	66.460.086	86,46
2	Pengelolaan data dan informasi spasial berbasiskan GIS untuk perencanaan pembangunan	56.378.600	55.586.291	98,59
3	Forum data perencanaan pembangunan provinsi Sumatera Barat	302.677.400	300.462.478	99,27
7	**PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**2.003.481.839**	**1.950.148.316**	**97,34**
1	Penyusunan buku kerjasama pemerintah dan swasta	40.339.600	39.950.986	99,04
2	Pengembangan kapasitas aparatur perencana	123.700.480	119.712.274	96,78
3	Penyelenggaraan musrenbang penyusunan dokren	292.189.583	290.715.626	99,50
4	Revisi RPJPD Provinsi Sumatera Barat 2006-2021	553.248.100	524.161.787	94,74
5	Penyusunan KUA/PPAS APBD	158.685.476	151.549.186	95,50
6	Penyusunan RKPD	218.287.080	210.814.517	96,58
7	Penyusunan KUA/PPAS Perubahan APBD	159.049.860	156.510.783	98,40

8	Pengelolaan dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi perencanaan pembangunan daerah	68.604.300	67.724.823	98,72
9	Implementasi system perencanaan pembangunan daerah	389.377.360	389.008.334	99,91
8	**PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**6.073.417.468**	**5.595.045.836**	**92,12**
1	Harmonisasi perencanaan dan kerjasama pembangunan bidang ekonomi	213.052.500	201.773.553	94,71
2	Harmonisasi program/kegiatan pertencanaan penanggulangan kemiskinan daerah	153.006.400	146.272.491	95,60
3	Pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan provinsi dan kab/kota	236.029.500	235.282.708	99,68
4	Pemantauan dan pelaporan manajerial aplikasi PP 39/2006	136.487.000	133.416.694	97,75
5	Akselerasi pencapaian sasaran pembangunan sub bidang pemerintah dan aparatur	102.204.000	102.107.968	99,91
6	Akselerasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan	418.010.000	409.866.484	98,05
7	Pengendalian dan evaluasi pembangunan	327.035.400	319.291.719	97,63
8	Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Sumatera Barat	429.816.000	394.511.922	91,79
9	Harmonisasi progress pelaksanaan pencapaian tujuan SDGs	45.470.100	44.583.187	98,05
10	Akselerasi pencapaian sasaran pembangunan sub bidang sumberdaya manusia	108.229.100	103.053.530	95,22
11	Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP)	704.000.000	687.935.850	97,72
12	Akselerasi dan sinkronisasi pembangunan sanitasi permukiman	92.198.400	86.975.345	94,33
13	Akselerasi dan sinkronisasi pembangunan pertanian dan perikanan	111.699.800	109.714.386	98,22
14	Pelaksanaan rakortek pembangunan daerah	270.119.615	267.737.795	99,12
15	Pelaksanaan pokja air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL)	154.511.600	153.651.982	99,44
16	Akselerasi dan sinkronisasi perkuatan kelembagaan sumber daya air	68.901.600	58.164.190	98,75
17	Akselerasi dan sinkronisasi perdagangan, industri, koperasi dan dunia usaha	104.899.900	103.373.509	98,54
18	Peningkatan kapasitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah	64.788.100	64206.613	99,10
19	Harmonisasi perencanaan makro dan pendanaan pembangunan	159.477.600	154.836.576	97,09
20	Harmonisasi program/kegiatan pembangunan daerah tertinggal	74.283.396	69.990.390	94,22
21	Kerjasama Ekonomi Regional dan Internasional	487.096.057	393.875.198	80,86

22	Harmonisasi perencanaan pembvangunan lingkup bidang social budaya dan pemerintah	508.573.300	495.500.556	97,43
23	Akselerasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan SDA, Tata Ruang dan LH	164.749.050	163.081.578	98,99
24	Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat di Sumatera Barat	285.732.000	278.404.590	97,44
25	Harmonisasi program dan kegiatan pangan dan gizi	76.001.000	72.326.624	95,17
26	Evaluasi kinerja pembangunan daerah	146.907.700	145.830.268	99,27
27	Akselerasi pencapaian sasaran pembangunan sub bidang Sosial Budaya	110.000.000	107.365.549	97,61
28	Akselerasi dan harmonisasi rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca	53.376.350	51.917.481	97,27
29	Penyusunan rancangan perubahan RPJMD 2016-2021	276.762.000	39.997.100	14,45

Secara umum Bappeda Provinsi Sumatera Barat tidak ditemui permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan karena dalam penyerapan anggaran Bappeda dapat memenuhi target yang dietapkan. Kendala yang ditemui adalah pada Program Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD 2016-2021 (realisasi fisik kegiatan mencapai 15% dan keuangan sebesar 14,45%) dimana kegiatan tersebut tidak dilanjutkan sehubungan dengan tindak lanjut Surat Dirjen Bina Bangda KEMENDAGRI Nomor : 050/6221/Bangda Tanggal 2 Desember 2019 tentang Revisi RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa mengingat prinsip efektif dan efisien Perubahan RPJMD Sumatera Barat disaranan untuk tidak melakukan Perubahan RPJMD mengingat waktu berakhirnya RPJMD kurang dari 3 Tahun dan proses pelaksanaan Penyusunan Perubahan RPJMD berlaku mutatis mutandis. Sehingga solusi yang ditawarkan adalah mengenai pencapaian RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dijelaskan melalui mekanisme pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan.

P E N U T U P

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Bappeda Sumatera Barat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019.

Dari hasil analisis pengukuruan kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dengan metode membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis, secara umum realisasi capaian kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat mendapat predikat amat baik. Secara rinci dapat disimpulkan bahwa:

1. Sasaran Strategis 1, Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas. Indikator kinerjanya adalah;
    - Persentase Kesesuaian antar dokumen Perencanaan dengan target 100 % dan realisasi 100 %

2. Sasaran Strategis 2, Meningkatnya tata kelola organisasi diukur dengan 2 indikator yaitu :
    - Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan target BB dan realisasi BB dan capaian kinerja 100%
    - Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program / kegiatan tepat waktu dengan target 95 realisasi 96,30 dengan capaian 101,36 %.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2019 ini dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat dapat disarankan sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Bappeda Provinsi Sumatera Barat.
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKIP.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Bappeda Provinsi Sumatera Barat, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.